

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN  
GAYUNGAN SURABAYA**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**KHUSNUL KHOTIMAH**

**NIM. 1713121001**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
SURABAYA  
2021**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN  
GAYUNGAN SURABAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Program Studi  
Universitas Bhayangkara Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



**Disusun Oleh:**

**KHUSNUL KHOTIMAH**

**NIM. 1713121001**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**SURABAYA**

**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gayungan Surabaya

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (SI)  
Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh:

**KHUSNUL KHOTIMAH**  
**1713121001**

Diperiksa dan disetujui oleh

Pembimbing I



Dra. Heru Irianto, M.Si  
NIDN : 0714056102

Pembimbing II



Indra Pratama Putra Salmon, S.sos,MPA  
NIDN : 0731129002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.  
NIND : 0723059004

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gayungan Surabaya**

**Diajukan Untuk Salah Satu Memperoleh Gelar Sarjana (SI)  
Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya**

Disusun oleh:

**KHUSNUL KHOTIMAH**  
**1713121001**

Pembimbing I



Drs. Heru Irianto, M.Si  
NIDN : 0714056102

Dosen Pembimbing

Pembimbing II



Indra Pratama Putra Salmon, S.sos,MPA  
NIDN : 0731129002

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi

Penguji I



Drs. Heru Irianto, M.Si  
NIDN : 0714056102

Penguji II



Dr. Susi Ratnawati, S.Sos.,M.M  
NIDN : 0717117001

Penguji III



Drs. Ali Fahmi., M.Si  
NIDN : 27015801

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Publik



Dra. Tri Prasetijowati, M.Si.  
NIDN : 0727076701

Menyetujui,  
Ketua Program Studi Administrasi



Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.  
NIDN : 0723059004

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 1713121001

Fakultas/ Prodi : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gayungan Surabaya.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi/Laporan Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di universitas Bhayangkara Surabaya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas tercantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di universitas Bhayangkara Surabaya.

Yang membuat pernyataan

**Khusnul Khotimah**

## **MOTTO**

Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu maka ALLAH akan memudahkan jalan menuju syurga (HR.Muslim)

Jika ingin meraih sesuatu yang belum pernah kita miliki maka jangan ragu untuk melakukan hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya (Penulis)

## KATA PENGATAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan dan karunia Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulis skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih secara tulus kepada :

1. Bapak Brigjen Pol.(purn) Drs Edy Prawoto,SH.,M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dra. Tri Prasetijowati.M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Bapak Bagus Ananda Kurniawan,S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Study Administrasi Publik.
4. Bapak Drs. Heru Irianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan selaku Dosen Wali yang telah dengan sabar memberikan pengarahan selama perkuliahan dan memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Indra Putra Salmon, S.Sos,MPA selaku Dosen Pembimbing II yang selalu masukan serta ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua responden yang bersedia saya jadikan sebagai narasumber untuk mengumpulkan data skripsi.
7. Orang tua yang selalu mendukung dalam keadaan apapun.
8. Keluarga tercintaku yang selalu memberikan dukungan mental dan dorongan motivasi.
9. Untuk Sahabatku Lia oktiana, Nabila C Sandi, Ayuna Rosita, Lia Yuliasari yang selalu menemani dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Teman teman yang telah menjadi tempat bersaing, berbagi ilmu, pendapat dan semangat serta keceriaan saat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu  
Semoga Tuhan Yang Maha Esa membals jerih payah dan pengorbanan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b></b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	2
1.4.1 Manfaat Praktis.....	4
1.4.2 Manfaat Teoritis .....	4
1.4.3 Manfaat Akademik .....	5
1.5 Definisi Konsep.....	3
1.5.1 Pengertian Program .....	4
1.5.2 Implementasi Publik.....	4
1.6 Metode Penelitian.....	4
1.6.1 Lokasi Penelitian .....	4
1.6.2 Subyek Peneltian .....	4
1.6.3 Fokus Penelitian .....	5
1.6.4 Sumber Penelitian.....	6
1.6.5 Teknik Penumpulan Data .....	7
1.6.6 Teknik Analisa Data.....	7
1.6.7 Langkah – Langkah Penelitian .....	9



<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Kerangka Konseptual Penelitian .....	12
2.3 Landasan Teori .....	12
2.3.1 Implementasi .....	4
2.3.2 Program .....	4
2.3.3 Kesejahteraan Masyarakat .....	4
<b>BAB III GAMBARAN OBJEKTIFITAS PENELITIAN .....</b>	<b>10</b>
3.1 Profil Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.....	11
3.1.1 Lokasi Penelitian .....	4
3.1.2 Sarana Dan Prasarana .....	4
3.1.3 Data Fasilitas Kecamatan Gayungan.....	4
3.2 Struktur Organisasi.....	12
3.2.2 Struktur Organisasi Kecamatan .....	4
3.3 Keadaan Dan Letak Geografis Penelitian .....	12
3.4 Visi Dan Misi .....	12
3.5 Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera.....	12
3.5.1 Program Mutu .....	4
3.5.2 Tujuan .....	4
3.5.3 Fungsi .....	4
3.5.4 Kesejahteraan Masyarakat .....	4
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA .....</b>	<b>10</b>
4.1 Implementasi Kebijakan KKS.....	11
4.1.1 Ukuran dan Tujuan.....	4
4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi.....	12
4.2.1 Hambatan Faktor Ukuran dan Tujuan .....	4
4.2.2 Hambatan Komunikasi Organisasi dan Aktivitas.....	4
4.2.3 Pelaksanaan Pemberian Bantuan.....	4
4.2.4 Dampak Pelaksanaan.....	4
4.2.5 Keterbatasan Penerima Bantuan.....	4

4.2.6 Kurangnya Partisipasi Masyarakat .....	4
4.2.7 Tidak Berjalannya Kewajiban Penerima .....	4
4.3 Upaya Meningkatkan Keefektifan .....	12
4.3.1 Mekanisme Pelaksanaan.....	4
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>10</b>
5.1 Kesimpulan.....	11
5.2 Saran .....	12
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>10</b>

# **IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN GAYUNGAN SURABAYA**

Khusnul Khotimah (1713121001)  
Kelas VIII C/ Administrasi Publik. FISIP  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
Email : [larasayuwidowati@gmail.com](mailto:larasayuwidowati@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera atau (KKS) di kelurahan Gayungan Kota Surabaya terdapat faktor yang dapat menghambat program ini berlangsung yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi program KKS karena masih ada masyarakat miskin yang belum terdaftar, sehingga program tersebut belum tepat sasaran akibatnya antara penerimaan KKS dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program kartu keluarga sejahtera (KKS) sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan Gayungan di Kota Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera (KKS) di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, belum berjalan secara efektif. Seperti masih adanya penerima bantuan yang belum terdaftar, sosialisasi hanya dilakukan kepada penerima KKS saja, dalam proses pendataan yang dilakukan pemerintah data yang di gunakan adalah hasil data pendataan perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga tidak sesuai kondisi di lapangan, perlu pemberian pengarahan dan perhatian kepada masyarakat serta melakukan validasi dan pemutahiran data guna meminimalisir kecemburuan di masyarakat.

**Kata Kunci** : Implementasi program kartu keluarga sejahtera (KKS), Kesejahteraan sosial

# IMPLEMENTATION OF THE PROSPECTIVE FAMILY CARD PROGRAM IN IMPROVING THE WELFARE OF THE COMMUNITY OF GAYUNGAN DISTRICT IN SURABAYA

Khusnul Khotimah (17131210001)  
Class VIII C/ Public Administration. FISIP  
Bhayangkara University Surabaya  
Email : larasayuwidowati@gmail.com

## ABSTRACT

The implementation of the Prosperous Family Card (KKS) program in Gayungan sub-district, Surabaya City, there are factors that can hinder this program from taking place, namely the lack of socialization and education of the KKS program because there are still poor people who have not been registered, so that the program is not yet on target. This study aims to determine the implementation of the Prosperous Family Card (KKS) program policy as a means of improving the welfare of the Gayungan sub-district community in Surabaya. The results of the study show that the implementation of the Prosperous Family Card (KKS) program in Gayungan District, Surabaya City, has not run effectively.

As there are still beneficiaries who have not been registered, socialization is only carried out to KKS recipients, in the data collection process carried out by the government the data used is the result of the 2011 Social Protection Data Collection (PPLS) conducted by the Central Statistics Agency (BPS). So that it does not match the conditions in the field, it is necessary to provide direction and attention to the community as well as validate and update data in order to minimize jealousy in the community.

Keywords: implementation of the Prosperous Family Card (KKS) program, Social Welfare

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara kesejahteraan secara singkat di artikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standart kesejahteraan hidup bagi setiap warga negaranya. Untuk mendukung mewujudan negara yang sejahteraan maka diperlukan kebijakan sosial. Sebagai suatu kebijakan publik dibidang kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial menunjukan pada kewajiban Negara untuk melindungi dan memberikan pelayanan dasar dan perlindungan sosial terhadap kelompok-kelompok rentan adalah beberapa contoh kewajiban Negara yang harus dipenuhi dalam konsep Negara Kesatuan (Fahrudin, 2012).

Kemiskinan masih menjadi masalah utama di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk pulau JawaTimur. Berdasarkan situs resmi data terbaru jumlah penduduk kurang mampu di provinsi Jawa Timur pada bulan juli 2020 sebesar 4.419,10 jiwa atau sekitar 11,09 % dari jumlah penduduk kurang mampu pada bulan September 2019, maka selama enam bulan tersebut terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 363,1 ribu jiwa. Sementara pada bulan september 2019 sampai Maret 2020 atau dalam satu tahun terakhir penambahan

penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 244 ribu jiwa sedangkan di daerah peresaan naik sebanyak 2.736,97 ribu jiwa. Faktor penyebab naiknya jumlah penduduk kurang mampu di Jawa Timur selama bulan September 2019 sampai Maret 2020 karena terjadinya kenaikan sebesar 1.36% dan akibatnya beberapa komoditi makanan mengalami perubahan indeks harga konsumen.

Pemerintah selaku *policy maker* membuat sebuah kebijakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan membuat program-program perlindungan sosial, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia dengan melakukan berbagai program, yaitu Program bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Bantuan Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Iuran Jaminan kesehatan (PBIJK) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program bantuan untuk pencari Kerja melalui (Kartu Prakerja), bagi keluarga kurang mampu/miskin melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering dikenal dengan sebutan SBY pernah meluncurkan sebuah kartu untuk menangani program percepatan dan perluasan sosial atau P4s. Keluarga yang berhak menerima program perlindungan sosial ini merupakan masyarakat miskin mendapatkan beras atau yang kita kenal (raskin). Pada saat sekarang kartu

pelindungan sosial (KPS) berubah diganti nama dengan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang telah di luncurkan oleh pemerintah sebagai perlindungan sosial berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 166 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan merupakan program dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus dilakukan secara berurutan, terencana dan sistematis dengan dunia usaha termasuk masyarakat untuk mengurangi jumlah kemiskinan penduduk dalam mewujudkan terciptanya kesejahteraan rakyat.
2. Program penanggulangan kemiskinan ini juga merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pengusaha, dan juga masyarakat untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu melalui bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi kecil serta program yang lainnya dalam meningkatkan kegiatan ekonomi.

Perlunya peran pemerintah untuk mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat untuk menjadikan acuan dalam mendorong menuju pembangunan. Program mengenai kemiskinan itu dimulai dengan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 2010, tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Dari mulai menerbitkan Peraturan Presiden tersebut,

maka di bentuklah tim khusus percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) yang hanya ditingkat pusat atau setara Nasional, yang anggotanya merupakan pemerintah, masyarakat, dunia usaha atau pengusaha dan orang yang berkepentingan lainnya. Selain itu ditingkat provinsi dan kabupaten atau kota telah dibentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK). Pada saat ini banyak program yang diluncurkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan yakni meningkatkan pendidikan, ekonomi, kesehatan serta mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah program kartu keluarga sejahtera (KKS). Untuk menjalankan program sosial ini, pemerintah Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yaitu intruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2004 tentang pelaksanaan program keluarga sejahtera melalui kartu simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia pintar melalui kartu Indonesia pintar (KIP), program Indonesia sehat melalui kartu Indonesia sehat(KIS) untuk membangun keluarga yang produktif. Kartu keluarga sejahtera (KKS) merupakan penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera bagi pemegang kartu KKS itu sendiri. Program pemberian bantuan non tunai itu sendiri dalam bentuk simpanan yang diberikan kepada 15,5 juta keluarga kurang



mampu di seluruh Indonesia, sejumlah 200.000/ keluarga/Bulan. Program simpanan keluarga sejahtera yang di berikan dalam bentuk layanan keuangan digital (LKD) dengan pemberian SIM card yang berisi e- money dalam bentuk simpanan giro pos. Pemberian simpanan ini merupakan perbaikan dari program pemberian bantuan langsung tunai dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat yang diberikan sebagai kompensasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak tahun 2013. Untuk mendapatkan kartu KKS ini yaitu dengan cara menukarkan kartu perlindungan sosial (KPS) yang dikeluarkan pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui kantor pos pada tahun 2014.

Kemudian pemerintah sebagai penyalur bantuan menerbitkan kartu keluarga sejahtera KKS (BNI, BTN, BRI, dan Mandiri). Kartu KKS menjadi sarana dalam penyaluran berbagai bansos seperti bantuan pangan non tunai dan PKH dari kementrian sosial yang disalurkan melalui kartu KKS. Sedangkan bantuan pangan non tunai (BPNT) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 dilaksanakan serentak di 34 kota Jawa dan 3 Kota di wilayah jawa Timur. Jumlah keluarga penerima manfaat atau (kPM) yang akan menerima BPNT Indonesia yaitu sejumlah 1.286.000 jiwa dengan total bantuan yang diberikan mencapai 1,7 triliun.

Salah satu kota yang menerapkan program BPNT adalah Kota Surabaya, yaitu berupa penyerahan kartu keluarga sejahtera (KKS) dan buku Tabunganku Kepada penerima bantuan, untuk masyarakat yang telah terdaftar menjadi peserta KPM, selain mendapat bantuan sosial dari program BPNT, peserta tersebut akan secara otomatis terdaftar menjadi peserta program peserta harapan (PKH). Dalam kartu KKS elektronik ini, terdapat sistem *saving account* dan *e-wallet* atau disebut juga dompet elektronik, sehingga peserta KPM dapat langsung membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Dan apabila dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan ditabung serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.

Supaya penyaluran bantuan sosial dapat optimal, maka kementerian sosial Republik Indonesia No.25 tahun 2016 tentang bantuan pengembangan sarana usaha melalui elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan atau biasa di sebut e-warung kube PKH. Sedangkan e-warung kube PKH merupakan sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh kube jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha dan pemasaran hasil produksi anggota kube.

Peraturan presiden No. 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT), dalam peraturan ini menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial kepada seluruh masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung meningkatnya manfaat serta ikut serta dalam meningkatkan keuangan keluarga. Dengan di berlakukannya pencairan bansos non tunai menggunakan buku tabungan dan kartu KKS merupakan upaya untuk mengajak masyarakat untuk mengenal dunia perbankan. Sistem penyaluran non tunai akan di salurkan ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM). Kartu KKS ini memiliki fitur *saving account* dan *e-wallet* yaitu kartu dapat digunakan untuk berbagai program bansos seperti program keluarga harapan (PKH)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 22 Desember 2020 di wilayah kelurahan Gayungan Kota Surabaya, sejauh ini penyelenggaraan implementasi kebijakan berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) telah terlaksana, namun program kartu keluarga sejahtera (KKS) tersebut mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Berikut hambatan yang terjadi:

- a. Sosialisai yang belum merata kepada seluruh masyarakat kurang mampu tentang dilaksanakannya program kartu keluarga sejahtera (KKS) ini, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mampu

yang belum terdata untuk di ikut sertakan menjadi peserta program kartu keluarga sejahtera tersebut.

- b. Kurang meratanya pembagian kartu tersebut untuk masyarakat kurang mampu, sehingga tidak sesuai data penerima program kartu keluarga sejahtera (KKS) ini belum tepat sasaran, hanya sebagian RT yang menerima program KKS tersebut, sehingga terjadi kecemburuan sosial karena pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera (KKS).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikatakan bahwa program pemerintah untuk mengatisipasi kemiskinan belum sepenuhnya membantu masyarakat secara maksimal. Ini diketahui dari permasalahan yang timbul saat ini yaitu belum meratanya pembagian kartu keluarga sejahtera kepada masyarakat yang benar benar layak untuk menerima kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian kurangnya terimplementasinya perindustrian kartu keluarga sejahtera menyebabkan kartu keluarga sejahtera tidak tepat sasaran. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka terdapat beberapa permasalahan yang penting untuk di kaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya?
3. Bagaimana upaya meningkatkan efektifitas program kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dilakukan nya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu, begitu pula dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi program kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi program kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan efektifitas program kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi seluruh pembaca dan menjadi sumbangan penelitian terhadap proses pemerintah dalam implementasi kartu keluarga sejahtera.

### **1.4.2 Manfaat teoritis**

Dari hasil penelitian diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

### **1.4.3 Manfaat akademik**

Dari penelitian diharapkan bermanfaat dalam mempelajari dan pengembangan ilmu pemerintahan khususnya berfokus pada kajian implementasi kartu keluarga sejahtera (KKS).

## **1.5 Definisi Konsep**

### **1.5.1 Pengertian Program**

Program adalah kata, ekspresi, atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga dapat dieksekusi atau dengan kata lain dapat implementasikan.

Dari pernyataan diatas program adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa kode skema ataupun dalam bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media dapat dibaca oleh pelaksana program dan akan mampu membuat sebuah program dapat bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus, termasuk persiapan dalam merancang intruksi-intruksi tersebut.

### **1.5.2 Implementasi publik**

Implementasi menurut Mulyadi (2015:12) merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi adalah sebuah proses dasar dalam keputusan. Bahkan dalam melakukan segala tindakan harus disesuaikan dengan implementasi.

Implementasi menurut Syauckani dkk (2004:295) pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil seperti yang telah diharapkan.

Dari penjelasan diatas implementasi sebuah langkah pertama maju dalam menetapkan sebuah aturan yang interpretasi dari sebuah program kebijakan. Selain itu mempersiapkan sumber daya keuangan yang sekaligus menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam didalam sebuah pelaksanaan implementasi. Selain itu merupakan strategi awal mengawali sebuah kebijaksanaan konkret untuk umum. Berdasarkan penjelasan diatas di ketahui bahwa proses pelaksanaan kekhawatiran implementasi yang sebenarnya tidak hanya perilaku

badan administratif bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial dan secara langsung mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah yang tujuan kebijakan publik dapat terwujud sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

Implementasi merupakan salah satu tahapan dari suatu kebijakan publik. Implementasi publik dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses setelah di tetapkannya undang undang yang berbagai aktor, organisasi, tata cara, dan teknik kerja sama untuk menjalankan sebuah kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan (winarno,2014:147).

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:128) implementasi di definisikan sebagai tindakan yang di lakukan baik oleh individu,pejabat,atau kelompok pemerintah bahkan swasta yang pencapaian tujuannya diarahkan dan di gariskan dalamkeputusan kebijakan. Dari pengertian beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah sebuah aspek utama dalam proses menjalankan kebijakan publik serta memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan dari kebijakan itu sendiri.



Menurut model Implementasi Donald van Metter dan Carl van Horn

Model pendekatan implementasi *top down* yang dirumuskan oleh van Metter dan van Horn dalam Agustino (2016:133) sering disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses dari implementasi bisa diartikan sebagai sebuah performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk dapat meraih sebuah kebijakan implementasi yang tinggi dan berlangsung dengan berbagai variabel. Ada enam variabel menurut van Metter dan van Horn yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi.

1. Tujuan dan ukuran implementasi

Kinerja implementasi ini dapat diukur tingkat keberhasilannya (jika, dan, hanya, jika) ukuran dan tujuan kebijakannya memang realistis dengan sosio kultur yang ada di tingkat pelaksanaan kebijakan. Apabila ukuran kebijakan atau tujuannya terlalu ideal untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakannya hingga titik dimana sebuah implementasi dinyatakan berhasil.

2. Sumber daya

Proses implementasi dinyatakan berhasil tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan manusia sebagai sumber daya terpenting dalam menentukan sebuah keberhasilan dari

implementasi, tetapi diluar sumber daya manusia. Sumber daya lain yang perlu di perhitungkan juga adalah sumberdaya finansial dan waktu.

### 3. Karakteristik implementasi

Karakteristik dari implementasi program KKS merupakan birokrasi, norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang akan mempengaruhi implementasi suatu program. Fokus dari pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi program publik. Hal ini menjadi penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan banyak di pengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para pelaksananya.

### 4. Sikap para implementasi

Sikap penerima dan penolak dari implementasi akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidak berhasilnya kinerja implementasi program publik ini. Hal semacam ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang di laksanakan bukan dari formulasi warga setempat yang mengenal dengan baik persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi implementasi yang akan di laksanakan adalah dari atas *top down* yang mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

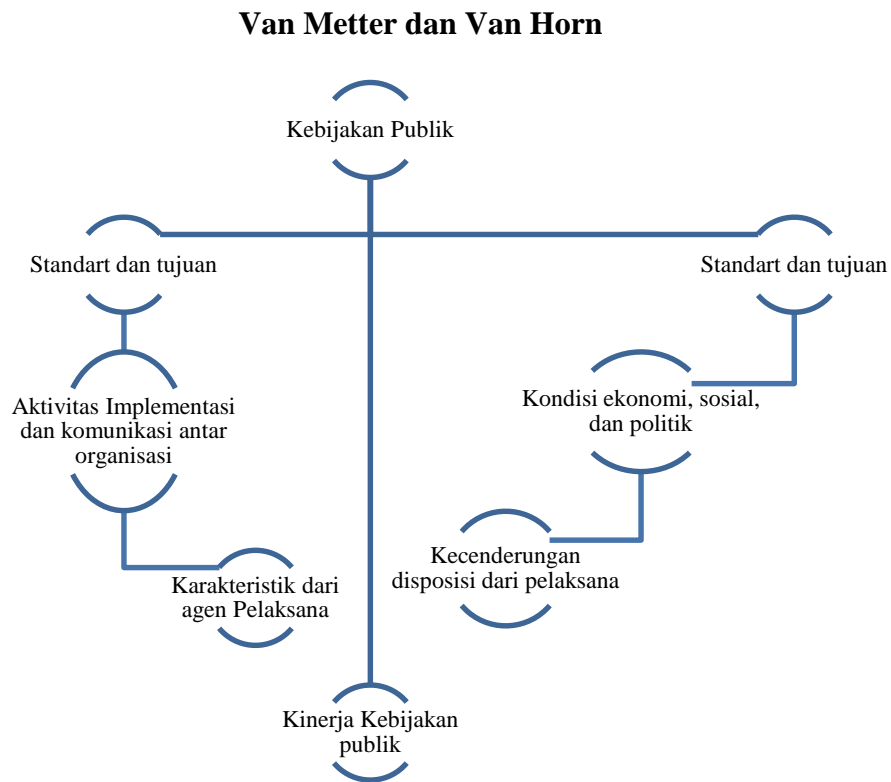
#### 5. Komunikasi antar organisasi dan aktivis implementasi

Koordinasi adalah mekanisme sekaligus menjadi syarat utama dalam menentukan keberhasilan implementasinya. Semakin baik koordinasi dan komunikasinya antara pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan akan sangat kecil kemungkinan bisa terjadi dan begitu pula sebaliknya.

#### 6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Hal yang perlu di perhatikan untuk menilai kinerja implementasi publik menurut van Metter dan van Horn dalam Agustino (2016:136) yaitu sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan yang telah di tetapkan. Lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik sekaligus lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi kendala kegagalan kinerja sebuah implementasi kebijakan. Oleh sebab itu maka untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

**Gambar : model pendekatan program implementasi kebijakan**



*Sumber Van Metter Horn dalam Agustino (2016:136)*

Dalam penelitian ini menggunakan model implementasi Van Horn dan Van Metter yang menyatakan enam variabel yang sangat menentukan keberhasilan dari sebuah implementasi sebuah kebijakan. Ukuran dan tujuan, kebijakan, sumber daya, karakteristik, agen pelaksana atau implementasi, sikap atau kecenderungan kepada para pelaksana atau implementasi, komunikasi antar organisasi aktivis serta lingkungan sosial, ekonomi, politik. Indikator yang di katakan oleh Van Metter dan

Van Horn merupakan model implementasi kartu keluarga terpusat dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

## **1.6 Metode Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mardalis (2017:26) penelitian deskriptif ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku, diantaranya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dengan menginterpretasikan kondisi yang sekarang terjadi. Penelitian kualitatif ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan seseorang yang diteliti. Selanjutnya menggunakan teknik deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana implementasi kebijakan program kartu keluarga sejahtera (KKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau kurang mampu di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ini menggunakan informan sebagai sumber informasi. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Sedangkan analisa data kualitatif dengan tahapan reduksi data atau triangulasi miles huberman, penyajian data dan kesimpulan.

### **1.6.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Gayungan sendiri terdiri

empat desa atau kelurahan diantaranya Kelurahan Dukuh Menanggal, Kelurahan Gayungan, Kelurahan Ketintang, Kelurahan Menanggal. Dan titik pengambilan data penelitian mengenai implementasi program kartu keluarga sejahtera (KKS) pada Kecamatan Gayungan, Kelurahan Ketintang, masyarakat penerima KKS, dan masyarakat yang tidak menerima KKS.

### **1.6.2 Subyek Penelitian**

Di dalam suatu penelitian kualitatif informasi atau data diperoleh dari serorang informan haruslah jelas dan terperinci yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian ada subjek penelitian yang dapat dijadikan sumber informasi tersebut. Subjek penelitian adalah salah seorang yang menjadi sasaran penelitian yang bisa memberikan informasi yang akurat dan jelas atau biasanya di sebut porposif dan mempunyai arah dengan tujuan tertentu. Selain itu subjek penelitian merupakan sumber data yang akan memberikan informasi yang sesuai sesuai dengan masalah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi, pelaksana partisipasi manfaat partisipasi dan faktor yang memperngaruhi partisipasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan subjek yang memenuhi parlementer yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

### 1.6.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif bermaksud untuk membatasi studi kualitatif dan juga membatasi sebuah penelitian guna untuk memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan. Pembatasan penelitian ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari rumusan masalah yang di hadapi dalam penelitian dengan tujuan dapat di pergunakan dalam memecahkan masalah dengan langkah mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis situasi dan kondisi suatu obyek yang sedang diteliti. Penulisan penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai permasalahan sebagai berikut :

1. Implementasi program kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

Dalam suatu kebijakan membutuhkan pengawasan dan pengawasan yang dimana pelaksanaannya merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Sedangkan pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

a. Penyebab terjadinya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kartu keluarga sejahtera

- Faktor internal
- Faktor eksternal

3. Bagaimana upaya meningkatkan efektifitas program kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

Keberhasilan dari program pemerintah dalam proses pelaksanaan kebijakan Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya yaitu dengan melakukan beberapa analisa yang dapat memperbaiki keefektifan sebuah program.

1. Analisis kebijakan retrospektif

adalah sebagai penciptaan dan informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat beberapa tipe analisis berdasarkan kegiatanyang dikembangkan oleh kelompok analisis yaitu analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi (penerapannya).



1. Analisis beorientasi disiplin, lebih terfokus pada pengembangan dan pengujian teori dasar dalam disiplin keilmuan, dan menjelaskan sebab.
2. Analisis berorientasi masalah, menitik beratkan pada aspek hubungan sebab akibat dari sebuah program, bersifat terapan, namun masih bersifat umum.
3. Analisis berorientasi pada aplikasi (penerapan), menjelaskan hubungan kualitas, lebih tajam untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari kebijakan dan para pelakunya. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kebijakan khusus, merumuskan masalah kebijakan, membangun alternatif kebijakan baru, dan mengarah pada pemecahan masalah praktis.

#### **1.6.4 Sumber Informasi**

Sumber informasi merupakan berperan sebagai pengarah dan terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang di teliti dilingkungan Kecamatan Gayungan. Narasumber atau sekarang disebut informan dalam penelitian ini dipilih karena untuk mengetahui atau terlibat langsung dengan kata lain terjun ke lapangan. Pemilihan narasumber atau informan dalam penelitian ini dengan cara teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud dan tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki

informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini adalah:

- 1) Sekertaris Kecamatan
- 2) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- 3) Kelompok Masyarakat
  - a. Penerima Kartu
  - b. Bukan Penerima Kartu

#### **1.6.5 Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif cukuplah beragam dan bervariasi. Dalam usaha menyaring data sangatlah dibutuhkan teknik pengumpulan data, oleh karena itu data yang didapatkan ketika melaksanakan penelitian dijadikan bahan untuk di kaji dan dianalisis dalam menyusun serta penulisan skripsi. Maka dari itu penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Pengumpulan data langsung terhadap subyek penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan maret 2021. Penelitian ini ditujukan kepada pelaksanaan implementasi kartu keluarga

sejahtera di kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai bagaimana peran lembaga pelaksana program kartu keluarga sejahtera dalam melaksanakan implementasi program kartu keluarga sejahtera, serta mengetahui pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera. Kegiatan observasi dilakukan untuk membuktikan kebenaran informasi dengan mengikuti pelaksanaan implementasi kartu keluarga sejahtera.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai dan memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009).

## 3. Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan data dengan mencari data –data sekunder yang terdiri dari bahan dokumentasi dari arsip kenegaraan. Bahan-bahan kepustakaan lainnya berupa beberapa buku-buku referensi, arsip dokumen-dokumen tentang bantuan sosial lainnya. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dokumen pustaka. Studi kepustakaan ini merupakan pengumpulan

data dengan cara membaca atau mengkajidan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan skripsi untuk memperoleh data-data yang dapat diperlukan dalam melaksanakan penelitian.

#### **1.6.6 Teknik Analisa Data**

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang sifatnya sangat beragam maka teknik analisis data yang sifatnya sangat beragam maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, oleh karena itu penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif karena menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Analisis data deskriptif kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara terhadap petugas kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, penulis sudah melakukan analisis dari jawaban informan, bila jawaban yang diwawancarai setelah di analisis belum memuaskan, maka peneliti akan

melanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Selain itu analisis deskriptif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dengan menggunakan data dokumen – dokumen perkara sehingga data yang di dapatkan anatara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan satu sama lain.

Ciri-ciri metode analisis deskriptis dapat disimpulkan sebagai sifat mengakumulasi data, penelitian memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena untuk menguji data digunakan teknik wawancara, lalu membuat produksi dan implikasi data masalah yang diteliti.

Untuk memudahkan penelitian maka peneliti membuat alur dalam teknik penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

#### **1.6.7 Langkah - Langkah Penelitian**

Tahap ini merupakan inti dari penelitian melakukan pencarian jawaban atas pertanyaan peneliti yang telah disusun untuk memecahkan inti masalah, adapun langkah-langkah yang ditempuh penelitian sebagai berikut:

- a. Persiapan penelitian dengan cara menentukan fokus permasalahan, judul, dan objek penelitian. Kemudian peneliti

mengajukan judul dan proposal skripsi yang sesuai dengan apa yang akan di teliti.

- b. Setelah proposal di setuju oleh pembimbing skripsi maka peneliti melakukan pra penelitian sebagai upaya mengali gambar awal tentang subjek yang akan diteliti.
- c. Dalam kegiatan ke lokasi memerlukan surat izin, dimana penulis haru mengajukan surat permohonan izin peneliti yang di tanda tangani oleh dekan untuk melakukan penelitian ke instansi yang terkait dengan penelitian skripsi.
- d. Setelah mendapatkan surat izin penelitian, penulis melakukan kunjungan ke Bakesbangpol atau kartor linmas Kota Surabaya
- e. Melakukan study kasus di lokasi dengan mengikuti kegiatan pembinaan yang berlaku di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dengan mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi.
- f. Membuat catatan untuk mengumpulkan data yang di pertanggung jawabkan peneliti dengan melakukan wawancara terhadap 5 orang petugas kecamatan, Bapak Andika selaku pendamping kartu keluarga sejahtera dan 3 orang ibu ibu sekitar Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

g. Dalam menyelesaikan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan, penulis melakukan bimbingan kepada Dosen pembimbing I dan II untuk mencari melakukan study kepustakaan untuk menarik kesimpulan disertakan dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu dengan adanya penelitian terdahulu dapat menghindari anggapan kesamaan penelitian yang pernah dilakukan dalam penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Suharianto (2015)

Penelitian berjudul “*Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Di Kantor Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara*”.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai masalah ditemukan dalam pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera ini, selain pelaksanaan program Kartu keluarga kurang tepat sasaran adalah akumulasi dari berbagai permasalahan ekonomi masa lalu, sementara pemerintah tidak mampu mengatasinya secara tepat sehingga membawa perekonomian kepada suatu keadaan yang lebih baik.



2. Hasil Penelitian Dian Marini (2015)

Penelitian berjudul “*Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tulangan Kabupaten Siak*”. Penelitian berupa bagaimana penetapan penduduk miskin yang berhak menerima bantuan Di Desa perawang Barat Kecamatan Tulangan Kabupaten Siak. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan langsung tunai. Kemudian dampak pemberian bantuan kartu keluarga sejahtera dengan melalui wawancara dan dokumentasi dan analisis data.

3. Hasil Penelitian Framita Dara Yolanda (2017)

Penelitian berjudul “*Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 2 pengukurani mplementasi dalam pelaksanaan KKS di bidang bantuan sosial bantuan sosial didesa Gunung Tinggi yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Pelaksanaan implementasi program Kartu Keluarga Sejahtera di desa Gunung Tinggi masih Kurang efektif, hal tersebut di ketahui berdasarkan aspek implementasi bahwa pelaksanaan di bidang bantuan sosial didesa gunung tinggi kurang tepat sasaran, karena belum mampu meningkatkan kejujuran dan kedisiplinan bagi penerima bantuan KKS serta

belum bisa meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dan dari keseluruhan bantuan sosial menunjukkan bahwa pelaksanaan KKS belum tepat , karena masih belum sepenuhnya tepat sasaran sesuai dengan kriteria KKS dan belum mampu mencapai tujuan KKS secara Nyata.

#### 4. Hasil Penelitian Andela Anggleni (2018)

Penelitian berjudul *“Implementasi Kebijakan program kartu Keluarga Sejahtera( KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang”*. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis dan simpulkan Implementasi program Kartu Keluarga sejahtera di Kelurahan Sekip Jaya kota Palembang adalah efektif. Hal ini dapat dilihat dari hampir seluruh responden terhadap alat ukur penelitian yaitu Ketepatan sasaran program, kepuasan terhadap program, keberhasilan pelaksanaan program, tujuan dan manfaat, menghasilkan jawaban efektif.

Peneliti menarik kesimpulan dari penjelasan terdahulu yang sudah di jelaskan diatas bahwa penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama, sehingga penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi dalam penulisan skripsi. Detail perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang dapat di jadikan tabel sebagai berikut :

NO	NAMA PENELITI	Suharianto (2015)
1	JUDUL PENELITIAN	Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Di Kantor Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara
	HASIL PENELITIAN	Untuk mengetahui apakah bantuan tepat sasaran dengan di kaitkan permasalahan ekonomi masa lalu. Pemerintah membawa perekonomian kepada keadaan yang lebih baik.
	PERSAMAAN PENELITIAN	Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif.
		Ruang lingkup pelaksanaan penelitian yang di lakukan yaitu membahas mengenai bantuan sosial.
		Pembahasan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan sosial.

	<p>PERBEDAAN PENELITIAN</p>	<p>Penelitian terdahulu lebih memfokuskan untuk bantuan langsung tunai, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang membahas tentang bantuan non tunai kepada keluarga penerima manfaat.</p> <p>Subyek yang diambil dalam penelitian terdahulu adalah semua masyarakat baik perempuan ataupun laki laki. Sedangkan penelitian sekarang subyek yang diteliti berfokus pada kartu keluarga saja.</p>
2	NAMA PENELITI	Dian Marini (2015)
	JUDUL PENELITIAN	<p>Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tulangan Kabupaten Siak</p>
	HASIL PENELITIAN	<p>Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui secara jelas masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan.</p>

	PERSAMAAN PENELITIAN	Dalam menarik kesimpulan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif
		Penelitian ini juga membahas mengenai pelaksanaan kartu keluarga sejahtera dimasyarakat.
	PERBEDAAN PENELITIAN	Pembahasan penelitian terdahulu berupa penetapan penduduk miskin yang berhak menerima bantuan. Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang keluarga penerima manfaat yang berhak menerima bantuan dengan di lakukan survey dari beberapa RT maupun RW.
3	NAMA PENELITI	Framita Dara Yolanda (2017)
	JUDUL PENELITIAN	Implementasi Program Kratu Keluarga Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang
	HASIL PENELITIAN	Penelitian ini dilakukan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

		<p>agar dapat meningkatkan perekonomian yang lebih baik. Sehingga harapannya nanti semua masyarakat dapat menerima bantuan sosial, sehingga mengurangi angka kemiskinan.</p>
	<p>PERSAMAAN PENELITIAN</p>	<p>Penelitaian yang dilaksanakan sama-sama meneliti tentang faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pembagian bantuan kartu keluarga sejahtera.</p> <p>Penelitian yang dilakukan sama-sama memperhatikan prosedur dalam proses pelaksanaan pembagian kartu keluarga sejahtera.</p> <p>Penelitian ini juga membahas tentang pelaksanaan kartu keluarga sejahtera untuk masyarakat.</p>
	<p>PERBEDAAN PENELITIAN</p>	<p>Penelitian terdahulu melaksanakan penelitian di Kecamatan Batu Kabupaten Deli Serdang sedangkan peneliti</p>

		melaksanakan di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.
4	NAMA PENELITI	Andela Anggleni (2018)
	JUDUL PENELITIAN	Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya kecamatan Kemuning Kota Palembang
	HASIL PENELITIAN	Hasil penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kartu keluarga sejahtera dilihat dari respon masyarakat yang di jadikan alat ukur bahwa pelaksanaannya kurang efektif.
	PERSAMAAN PENELITIAN	<p>Penelitian yang di lakukan sama-sama meneliti tentang apa saja yang menjadi hambatan selama pelaksanaan kartu keluarga sejahtera.</p> <p>Metode yang di gunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.</p>

	<p>PERBEDAAN PENELITIAN</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang kebijakan yang dilakukan dalam kartu keluarga sejahtera. Sedangkan peneliti sekarang membahas tentang program kartu keluarga sejahterannya.</p>
--	---------------------------------	--

*2.1 Tabel Rangkuman Penelitian Terdahulu*

## 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

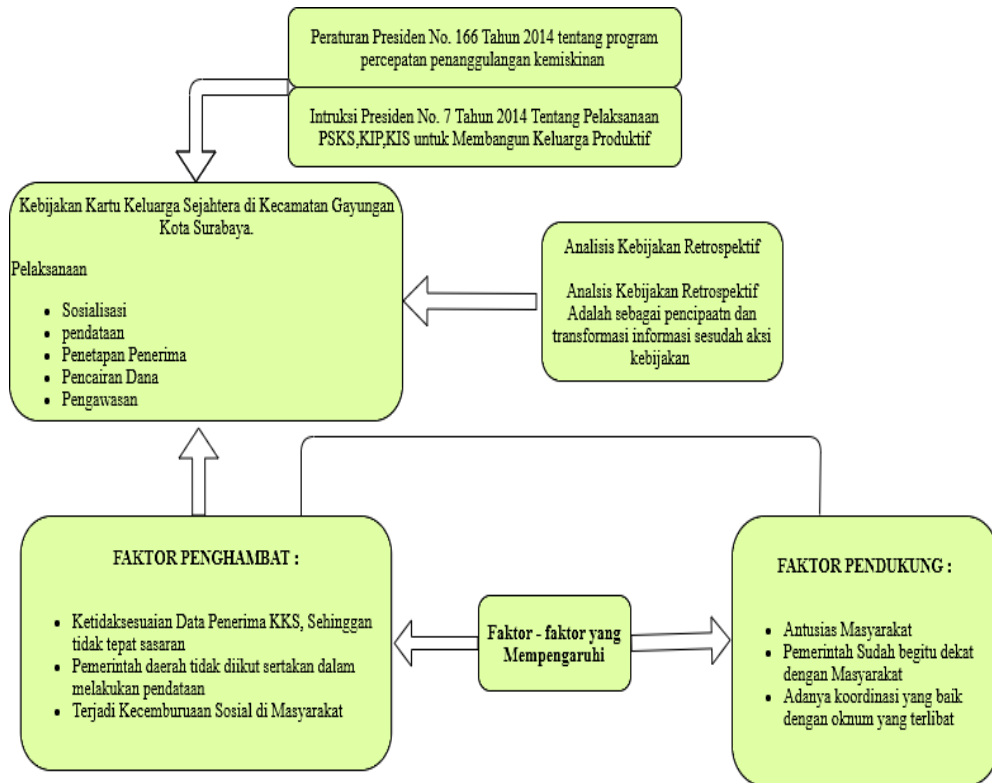
Keluarga Sejahtera adalah kartu yang di terbitkan oleh pemerintah sebagai tanda keluarga kurang mampu, kata ketidakmampuan bisa di katakan masyarakat miskin yang dimana keadaannya terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, tempat berlindung dan kesehatan. Terjadinya kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya aksesmendapat pekerjaan.

Pemerintah memiliki perang yang sangat penting apalagi di kondisi pandemi covid 19 dalam mencapai tujuan suatu Negara. Sebagaima diamanatkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan rakyat dapat di tingkatkan apabila kemiskinan dapat dikurangi. Sehingga untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah mengeluarkan program kartu keluarga



sejahtera yang di atur dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 dengan upaya peningkatankesejahteraan masyarakat dan meningkatkan martabat keluarga kurang mampu dengan perlindungan dan pemberdayaan untuk membangun keluarga produktif.

Berdasarkan hal tersebut dapat di tafsirkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berdasarkan fungsi pemerintah daerah yaitu melakukan pelaksanaan dan pengawan khususnya di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Maka dari latar belakang permasalahan, sehingga dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut:



## 2.2 Kerangka Konseptual penelitian

### 2.3 Landasan Teori

Landasan teori penelitian merupakan hasil dari pemikiran rumusan masalah yang bertujuan untuk menarik kesimpulan terhadap masalah yang di teliti. Tahap penelitian selalu memiliki pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini alasan teori memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat dan analisi dari data yang didapatkan. adapun landasan teori dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 2.3.1 Implementasi

Pembahasan pertama mengetahui tentang implementasi terlebih dahulu. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu program dan juga memastikan tercapainya program tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.

Menurut Nurdin usman (usman, 2002:70) dalam bukunya yang berjudul *konteks Implementasi berbasis kurikulum* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Hanifa (Harsono, 2002:67) dalam bukunya yang berjudul *Implementasi dalam birokrasiPembangunan* mengemukakan pendapat sebagai berikut Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Guntur Setiawan (Setiawan, 2004:39) dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan

pendapatannya sebagai berikut implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Dari pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi dimulai pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya.

### **2.3.2 Program**

Program merupakan kumpulan intruksi yang digunakan untuk mengatur sesuatu agar dapat menjalankan tindakan tertentu. Jika tanpa adanya program, sebenarnya segala sesuatu akan terjadi pebinaran.

Menurut Sukrisno program merupakan ekspresi, kata, atau pernyataan yang dirangkai dan disusun menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah-langkah, untuk menyelesaikan masalah yang di berikan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga dapat dieksekusi oleh komputer.

Sistem operasi merupakan program-program lain sebagai jembatan antara pengguna dengan tujuan. Dengan adanya sistem yang bagus, maka sebuah program dapat dioptimalkan kinerja dari setiap komponenen.

### **2.3.3 Kesejahteraan Masyarakat**

Kartu keluarga sejahtera adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah untuk keluarga miskin. Sebelumnya kartu keluarga sejahtera (KKS) ini bernama kartu perlindungan sosial (KPS). Sebelumnya KPS bentuknya adalah tunai, sedangkan KKS sudah berbentuk nontunai. KKS ini di terbitkan oleh beberapa bank yang bergabung dalam himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kartu keluarga ini digunakan untuk menerima bantuan dari pemerintah, salah satunya adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar lima ratus ribu rupiah. Ada banyak manfaat yang bisa diterima dengan memiliki kartu keluarga sejahtera.

Manfaat memiliki kartu keluarga sejahtera, dapat menyimpan kuota bantuan sosial yang didapat dari pemerintah. Selain itu kartu keluarga sejahtera dapat di gunakan untuk mengambil bantuan beras dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Kartu ini di gunakan sebagai uang elektronik berupa kartu debit atau ATM yang bisa digunakan

untuk transaksi perbankan seperti menarik saldo, membeli pulsa, membayar tagihan dan lain-lain. Selain itu kartu nya juga bisa digunakan untu menabung layaknya seperti kartu ATM biasanya

## **BAB III**

### **GAMBARAN OBYEK PENELITIAN**

#### **3.1 Profil kecamatan Gayungan Kota Surabaya**

Kecamatan Gayungan merupakan sebuah kecamatan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kecamatan Gayungan ini di kepalai oleh Bapak Camat Soediby, SH,M.Si yang beralamat di Jalan masjid agung timur No. 2 Surabaya. Yang mempunyai luas wilayah kecamatan sekitar 6.07 Km dengan kepadatan penduduk mencapai 6.563 jiwa/km.jumlah laki laki sebanyak 1.9643 jiwa dan perempuan 2.0194 jiwa.sedangkan jumlah kelahiran mencapai 595 jiwa disisi lain angka kematian mencapai 143 jiwa.selain itu penduduk datang lebih tinggi sekitar 878 jiwa daripada jumlah penduduk pindah sekitar 758 jiwa. Untuk Kecamatan Gayungan sendiri hampir tidak ada WNA dan Kecamatan Gayungan di dominasi oleh WNI bisa dilihat dari jumlah pembuka KTP perbulan sebanyak 8.440 lembar untuk WNI, sedangkan untuk jumlah calon penduduk sebesar 289 lembar /bulan. (*Surabaya.go.id*)

Pada penelitian kali ini saya meneliti program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat miskin yaitu program kartu keluarga sejahtera (KKS). Kartu ini di gunakan sebagai alat transaksi untuk memanfaatkan program bantuan yang di berikan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat miskin atau kurang mampu. Bantuan ini berupa uang elektronik yang di transfer ke rekening penerima sebanyak Rp. 550.000 per bulan atau senilai dengan beras 10 kg, gula 2 kg, minyak sayur, telur, tepung terigu, kacang hijau, sayuran per keluarga.

Jadi implementasi kartu keluarga sejahtera itu merupakan bantuan sosial pengganti program PKH yang di ganti nama menjadi KKS. Setiap keluarga yang memiliki kartu PKH sudah otomatis mendapatkan KKS dan terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan KKS sendiri berupa bantuan dalam bentuk dana yang di transfer langsung ke bank atau langsung ke rekening penerima yang berupa kartu KKS. Untuk penarikan penerima bisa langsung datang e-voucher merchant atau yang sering kita dengar e-warong terdekat. Keluarga penerima manfaat (KPM) bisa datang langsung ke bank untuk mencairkannya.

Dalam melakukan penelitian untuk meneliti program kartu keluarga sejahtera peneliti membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu dan paling lama sekitar satu bulan. Untuk alur penelitian pertama melakukan survey lokasi, meminta persetujuan ijin dari kampus, memberikan surat ijin kampus kepada linmas, selanjutnya memberikan surat ijin dari linmas ke Kecamatan Gayungan dan akhirnya boleh melakukan wawancara kepada pihak pihak yang terkait dengan program kartu keluarga sejahtera (KKS).

### **3.1.1 Lokasi Penelitian**

Gayungan merupakan salah satu kecamatan di Kota Surabaya. Kecamatan ini terletak di wilayah Surabaya Selatan dengan ketinggian kurang lebih 7 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kota Surabaya 2017, Kecamatan Gayungan memiliki luas 615.078 hektare dan terbagi menjadi empat kelurahan. Antara lain Dukuh Menanggal, Menanggal, Gayungan, dan Ketintang.



Kecamatan Gayungan merupakan salah satu kecamatan di Kota Surabaya yang terdiri dari 4 (Empat) kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 48.777 jiwa. Jumlah rumah tangga penerima KKS pada tahun 2017 sebanyak 1.882 rumah tangga. Kecamatan Gayungan merupakan wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Sampai dengan tahun 2014 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan merupakan pusat pemerintahan Kota Surabaya sebelum berpindah ke wilayah Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan pada tahun 2015.

Total penduduk Kecamatan Gayungan pada 2016 sebanyak 48.777 jiwa. Kelurahan dengan penduduk paling banyak adalah Ketintang dengan penduduk 17.371 jiwa. Sementara Dukuh Menanggal 9.834 jiwa, Menanggal 10.690 jiwa, dan Gayungan 11.380 jiwa. Rincian tingkat pendidikan warga Kecamatan Gayungan meliputi: Taman Kanak-Kanak 10.452 jiwa, Tamat SD/Sederajat 67.623 jiwa, Tamat SLTP/ Sederajat 49.824 jiwa, Tamat SLTA/ Sederajat 66.395 jiwa, Akademi (D1-D3) 9.126 jiwa, Universitas (Sarjana S1-S3) 68.687 jiwa, Non Formal (Pondok Pesantren, dll) 3.308 jiwa, dan tidak diketahui 21.737 jiwa.

### **3.1.2 Sarana Dan Prasarana**

Kecamatan Gayungan memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi setiap tahunnya, hal itu di karenakan:

- Kecamatan Gayungan merupakan jalur utama menuju Terminal Bungurasih dan Bandara Juanda sehingga mengakibatkan terjadinya pergerakan yang sangat tinggi.

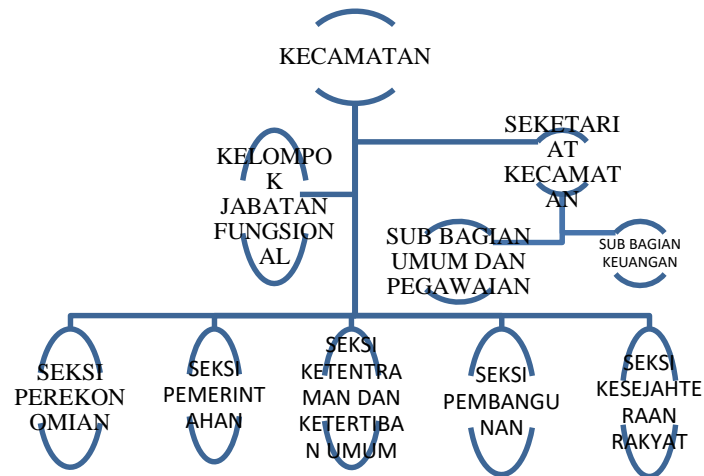
- Pada Kecamatan Gayungan banyak terdapat kantor instansi pemerintahan baik dalam skala Regional maupun Nasional seperti Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jatim, Dinas PU Pengairan Jatim, Dinas Pertanian Jatim dan lainnya masih banyak lagi.
- Pada Kecamatan Gayungan terdapat 4 ( Empat ) Perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Surabaya, Universitas Bhayangkara, Universitas Adi Buana dan Universitas Pelita Harapan.
- Adanya penduduk urban yang datang untuk mengadu nasib ataupun mencari kerja di wilayah Kecamatan Gayungan.

### **3.1.3 Data Fasilitas Kecamatan Gayungan**

Kecamatan Gayungan terdiri dari kantor milik pemerintah yang bersifat permanen dengan luas  $\pm 3500 \text{ M}^2$ . dengan sarana dan prasarana gedung untuk rapat, ruangan pelayanan dan staf kecamatan, mushola, dapur umum dan halaman yang luas. Adanya fasilitas komputer untuk pegawai pelayanan dan staff. Adanya fasilitas kendaraan dinas yang di gunakan untuk operasional kantor yaitu 3 unit sepeda motor. Adanya jaringan listrik dan kotak pengaduan masyarakat. Terdapat administrasi dan pelayanan seperti adanya papan informasi masyarakat, loket pelayanan dengan mengacu pada strategi operasional pelayanan (sop pelayanan). Dengan adanya fasilitas yang sangat memadai diharapkan pelayanan terhadap masyarakat lebih baik lagi kedepannya.

### 3.2 Stuktur Organisasi Kecamatan

#### 3.2.1 Stuktur Organisasi kecamatan Gayungan :



Gambar 4 susunan organisasi kecamatan

### 3.3 Keadaan dan Letak Geografis Penelitian

Nama : Kecamatan Gayungan

Alamat : Jalan masjid agung timur No. 2 Surabaya

Kelurahan : Gayungan

Kecamatan : Gayungan

Kota : Surabaya

Kode Pos : 60234

Telepon : -

Luas wilayah : 60,700Ha

Batas Wilayah : - Sebelah Utara berbatasan dengan kantor keagamaan

- Sebelah Timur berbatasan dengan Puskesmas Gayungan

- Sebelah Barat berbatasan dengan masjid Agung

- Sebelah Selatan berbatasan dengan pemukiman warga

Pembagian Wilayah : Rukun Warga : RW  
Rukun Tetangga : RT

### **3.4 Visi Dan Misi Kecamatan Gayungan**

VISI:

Gayungan terdepan dalam pelayanan masyarakat yang berkarakter, inovatif, transparan, dan berdaya saing global.

MISI:

- a. Mempercepat implementasi penyelenggaraan tata laksana umum pemerintah yang akutanbel melalui pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- b. Mengoptimalkan sistem dan mekanisme pelayanan berbasis komputerisasi dan berpendoman pada standart pelayanan minimal.
- c. Meningkatkan koordinasi dan intervensi SKPD serta jajaran samping dalam menindaklanjuti program dan kegiatan Kecamatan.
- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kota Surabaya.
- e. Mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi dan masyarakat dalam urusan pelayanan secara online.

MOTTO:

Gayungan Smart

### **3.5 Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera**

Dalam pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera ini memiliki mutu program yang dilaksanakan, serta memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan sebuah program pemerintah kartu keluarga sejahtera

#### **3.5.1 Program mutu**

Program mutu adalah program resmi dan tertulis oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek mutu dan aktivitas dalam implementasi terhadap keluarga penerima manfaat. Program mutu yang di tetapkan sebagai berikut:

1. Menjadi lembaga yang bertugas menyalurkan bantuan kartu keluarga sejahtera yang berkomitmen untuk memenuhi kepuasan dalam melayani masyarakat.
2. Menjadi lembaga yang meningkatkan pelayanan di segala bidang dilakukan secara berkesinambungan. Perogram mutu tersebut berpijak kepada pelayanan publik dengan maksud untuk terwujudnya pembangunan manusia secara mandiri yang pelaksanaannya di lakukan secara berkesinambungan.

Dalam penjabaran program mutu pelaksanaan kartu keluarga sejahtera memiliki nilai-nilai dasar yang merupakan nilai-nilai yang di junjung tinggi oleh petugas dan yang memadu petugas dalam memilih berbagai alternatif yang di perlukan untuk menuju masa depan.

### 3.5.2 Tujuan

Implementasi kartu keluarga sejahtera memiliki tujuan dan fungsi dalam mensejahterakan keluarga penerima manfaat untuk perekonomian yang lebih baik, dan mempunyai bekal untuk dipakai dimasa depan. Sedangkan di dalam pelaksanaannya sangat menjunjung tinggi alternatif guna dijadikan pandangan untuk jauh lebih baik dimasa mendatang. Tujuan itu diartikan sebagai suatu kondisi yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan di tetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Rumusan Tujuan pelaksanaan implementasi kartu keluarga sejahtera untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pelaksanaan sistem permasyarakatan.
2. Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja.
3. Terwujudnya sinerga dan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan permasyarakatan.
4. Terwujudnya reitagrasi sosial keluarga manfaat secara sehat dalam hidup,
5. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat keluarga penerima manfaat
6. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat

7. Meningkatkan profesionalisme dan budaya kerja petugas kartu keluarga sejahtera yang transparan, bersih dan bermartabat.
8. Terwujudnya penyelenggaraan masyarakat yang berbasis teknologi berupa e-warong.

### **3.5.3 Fungsi**

Implementasi kartu keluarga sejahtera mempunyai tujuan yang di terbitkan juga memiliki fungsi yang harus diterakan dan dilaksanakan agar tercapainya visi dan misi yang di harapkan. Implementasi fungsi kartu keluarga sejahtera antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan keluarga penerima manfaat yang berhak menerima agar tepat sasaran.
2. Memberikan sosialisasi, mempersiapkan sarana dan memberikan arahan terhadap keluarga penerima manfaat
3. Melakukan survey lokasi guna mentada ulang dan mengecek apakah sudah berjalan sesuai program kartu keluarga sejahtera.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA**

Pada bab ini penulis akan menyajikan data dan hasil wawancara serta analisis data serta dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Penyajian data ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang di peroleh secara mendalam dengan narasumber. Selain melakukan wawancara kepada pihak terkait implementasi program pemerintah No. 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera, penulis juga mengambil dokumentasi dari wawancara yang berlangsung di kecamatan gayungan kota Surabaya. Penulis juga mendapatkan data data dari hasil wawancara. Setelah data di dapatkan langkah selanjutnya dilakukan sebuah analisis data. Penelitian kualitatif ini analisa data difungsikan untuk mengorganisasi data, memilah-milah data untuk mengelola menjadi sebuah kesatuan dan menemukan bentuk pola yang penting untuk menjawab masalah dari penelitian (Moleong, 2005). Tujuan dari analisis data pada penelitian ini adalah untuk memberikan suatu logika yang jelas dari hasil penelitian yang sudah di lakukan sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian yaitu bagaimana implementasi intruksi No. 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera. Adanya penggabungan data dan penyajian data dengan analisis data nantinya dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data sehingga mampu menghasilkan informasi yang mudah di pahami oleh pembaca. Informasi yang jelas akurat dan terpercaya sangat bermanfaat untuk masyarakat yang belum mengetahui dan belum mendapatkan kejelasan atas pengetahuannya. Sementara itu, peneliti akan berusaha mengkajikan data hasil penelitian dengan teori yang relevan dalam penelitian ini. Program ini mengurangi angka kemiskinan



dengan pemberian beras miskin yang dilakukan pemerintah kepada warga miskin adalah program substantif, yaitu jenis program yang menyatakan apa yang akan dilakukan pemerintah atas masalah tertentu. Masalah yang dimaksud dapat terselesaikan dengan adanya bantuan tersebut, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Dengan kata lain bisa mengakomodasi kebutuhan yang pokok yang lainnya seperti tanggung jawab pendidikan dan kesehatan

#### **4.1 Implementasi Program kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya**

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Gayungan Kota Surabaya diadakan program implementasi kartu keluarga sejahtera (KKS). Salah satu tempat pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera (KKS) di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Program kartu keluarga sejahtera (KKS) merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengsejahterakan masyarakat Indonesia khususnya pada Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Menurut Bapak Arif Rahmad Junaidi S.E Sebenarnya yang di maksud kartu keluarga sejahtera atau KKS tersebut.

“jadi begini mbak sebenarnya kartu keluarga sejahtera itu merupakan bantuan dari kementrian sosial yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sedangkan kartu keluarga sendiri dibagi menjadi dua yaitu program keluarga harapan (PKH) yang di tujukan untuk lansia dan pendidikan anak dan bantuan dalam bentuk uang tunai senilai Rp 550.000. Selain itu bantuan juga bisa tidak di uang kan yaitu bantuan pangan non tunai (BPNT) contohnya seperti kebutuhan pokok beras, kacang hijau sayuran, telur dan lain lain yang nominal pembelanjannya juga Rp 550.000. tetapi intinya sama program kartu keluarga sejahtera”. ( Hasil wawancara 9 Maret 2021)

Pernyataan dari Bapak Arif Rahmad Junaidi, S.E merupakan paparan dari kartu keluarga sejahtera yang di perjelas pembagiannya. Dengan bantuan perbulan senilai Rp 550.000 untuk 1 kartu keluarga yang bisa di uangkan atau di ganti dengan pembelanjaan kebutuhan pokok. Guna untuk mensupport perekonomian keluarga dan bantuan dapat langsung di manfaatkan saat itu juga. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya bantuan tersebut perekonomian masyarakat membaik. Dan masyarakat bisa lebih sejahtera secara ekonomi dan finansial.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin atau kurang mampu, pemerintah sendiri mengeluarkan intruksinya No.7 tahun 2014 tentang pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera, program Indonesia pintar, program Indonesia sehat untuk membangun masyarakat yang produktif.Sedangkan pihak kecamatan merupakan perantara bantuan Seperti yang diamanat sebagaimana yang telah tertuang dalam program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, yang telah di sampaikan oleh pengelola bantuan kartu keluarga sejahtera Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Bapak Arif Rahmad Junaidi, S.E adalah sebagai berikut:

“jadi sebenarnya peran itu merupakan perantara bantuan dari pusat. Kami pihak kecamatan menjalankan prosedur sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat. Seperti penyampaian bantuan program kartu keluarga sejahtera yang di lakukan satu bulan sekali, tetapi jika pergantian tahun terkadang pemberian bantuan terkadang molor dikarenakan adanya penyesuaian anggaran dari pusat. Untuk data penerima bantuan kartu keluarga sejahtera kami pihak kecamatan tidak mendata langsung ke lapangan karena penerima bantuan kartu keluarga sejahtera ini menggunakan acuan data program pendataan perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 yang di jadikan acuan selama kurang lebih tiga bulan pelaksanaan dan selanjutnya akan di lakukan pendataan ulang oleh pihak RT ataupun RW yang mengetetahui dengan baik kondisi masyarakatnya, apakah layak menerima bantuan atau tidak dan di awasi secara berkala oleh kecamatan gayungan Kota Surabaya. Supaya tidak terjadi pendataan sepihak dalam artian hanya orang orang khusus atau dalam lingkup keluarga saja yang

mendapatkan bantuan. Hal ini dilakukan agar bantuan dapat di peroleh masyarakat secara merata”. ( Hasil wawancara 9 Maret 2021)

Pernyataan dari Bapak Arif Rahmad Junaidi S.E. di atas menjelaskan peranan pihak kecamatan terkait pelaksanaan kartu keluarga sejahtera yang dilaksanakan di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Dimana hal yang disampaikan menunjukkan adanya peran sangat penting oleh pihak Kecamatan dalam penyaluran bantuan kartu keluarga sejahtera. Pihak kecamatan menyalurkan bantuan kartu keluarga sejahtera sesuai dengan data dari program pendataan perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011. Program bantuan kartu keluarga sejahtera ini didapatkan setiap bulannya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pihak kecamatan jika bantuan tersebut sudah di turun dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil penelitian kartu keluarga sejahtera yang analisa datanya menggunakan data dari program pendataan perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011. Hasil pelaksanaan program KKS di daerah kecamatan Gayungan belum berjalan efektif dalam pelaksanaannya karena ada beberapa warga kurang mampu/miskin masih belum ikut serta. Dalam data tersebut kira kira ada 200 kartu keluarga yang mendapatkan bantuan kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Dan penyaluran bantuan tersebut berjalan kurang lebih selama tiga bulan dengan jumlah kapasitas penerima 200 kartu keluarga. Setelah tiga bulan sambil di data ulang oleh pihak RT dan RW yang awalnya 200 kartu keluarga menjadi 480 kartu keluarga yang akan diajukan ke pusat dan diawasi oleh pihak kecamatan.

sosialisasi yang kurang dan koordinasi dari pemerintah pusat, sehingga data penetapan kepesertaan program KKS tersebut kurang tepat dan kurang akurat serta kurang tepat sasaran, oleh karena itu menimbulkan kecemburuan sosial dalam

pelaksanaannya, sehingga dalam melaksanakan program KKS belum berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin wilayah tersebut. Sedangkan program kartu keluarga sejahtera (KKS) merupakan penanganan keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Disisi lain ada yang menambahkan pendapat dari yang di sampaikan oleh Bapak Arif Rahmad Junaidi, S.E diatas, pernyataan lain yang menambahkan di sampaikan oleh Ibu Naning Astuti yang juga selaku pengelola bantuan sebagai berikut:

“Begini mbak dengan adanya penerima bantuan yang tertera diatas tentu saja pihak kecamatan mensosialisasikan kartu keluarga sejahtera kepada masyarakat. Dengan cara melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk mensosialisasikan kartu keluarga sejahtera. Tetapi dulu itu pihak kecamatan mengikuti aturan dari penerima kartu keluarga sejahtera menggunakan acuan data program pendataan perlindungan sosial tahun 2011. Dan setelah peraturan perdatannya berubah kami mensosialisasikan ulang kepada masyarakat tentang bantuan kartu keluarga sejahtera yang dulunya hanya 200 kartu keluarga sekarang menjadi 480 kartu keluarga atau biasanya disebut keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu ada syarat dan kriteria khusus dalam penerima kartu keluarga sejahtera yaitu masyarakat Surabaya Kecamatan Gayungan kurang mampu yang berdomisili di lingkup kecamatan Gayungan Kota Surabaya dengan survei dan sosialisasi oleh RT dan RW setempat. Sehingga pihak RT dan RW yang mendata ulang jadi pihak kecamatan hanya melakukan pengecekan data nya dan memastikan bantuan itu tepat sasaran” ( Hasil wawancara 9 Maret 2021)

Dari pernyataan ibu Naning Astuti menjelaskan bahwa program penerimaan kartu keluarga sejahtera pertama kali datanya mengacu pada program pendataan perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011, serta disosialisasikan secara merata sesuai dengan data tahun 2011. Berkaitan dengan basis data siapa yang berhak sebagai penerima bantuan sosial, yang hingga kini masih belum bisa di pertanggung jawabkan akurasi nya. Saat ini, skema program perlindungan sosial di Indonesia masih mengandalkan data yang sebetulnya

usah dan jauh dari mutakhir. Kemudian setelah peraturannya diubah data penerima kartu keluarga sejahtera di data oleh RT dan RW yang diawasi oleh pihak Kecamatan Gayungan. Dan tidak lupa juga disosialisasikan ulang kepada penerima kartu keluarga sejahtera yang sudah terverifikasi. Sosialisasinya itu juga melalui pertemuan dengan masyarakat dan pihak RT maupun RW. Adapun syarat dan kriteria khususnya yaitu warga surabaya kurang mampu yang berdomisili di kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Dan setelah setelah masyarkatnya terdata dilakukan pengecekan ulang oleh pihak Rt atau RW dan pihak kecamatan setempat supaya bantuan merata dan tepat sasaran.

Berdasarkan model pendekatan dari Van Metter dan Van Horn. Pendekatan masalah implementasi dengan lebih dahulu mengemukakan pertanyaan pokok, yaitu: faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi program kartu keluarga sejahtera (KKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Dari pernyataan tersebut dirumuskan tujuh faktor yang menjadi syarat utama keberhasilan proses implementasi yakni: ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik implementasi, sikap implementasi, komunikasi antar organisasi dan aktivitas implementasi,serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Sedangkan untuk mengukur sebagai acuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggunakan fungsi kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Friendlander & Aple dalam Fahrudin diantaranya adalah Fungsi pencegahan (*preventive*), fungsi penyembuhan (*curative*), fungsi pengembangan (*development*), fungsi penunjang(*supportive*).

Kedua variabel tersebut menjadi kriteria penting dalam mengimplementasikan program kartu keluarga sejahtera (KKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Hasil pembahasan kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut :

#### **4.1.1 Ukuran dan Tujuan**

Ukuran dan tujuan merupakan tolak ukur dari sebuah kebijakan. Keberhasilnya suatu kebijakan dapat diukur dengan tercapai atau tidaknya tujuan dari pembuat kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa standar dalam menerima peserta program KKS sudah jelas sedangkan dalam menentukan sasaran penerima menetapkan data program perdataaan Perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 sebagai acuan penerima KKS. Sehingga sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan perdataan yang menganut program perdataan perlindungan sosial (PPLS) hanya berjalan sekitar beberapa bulan. Kemudian perdataan di lakukan oleh pihak RT/ RW dengan di awasi oleh pihak kecamatan dan tidak lupa untuk di lakukan pengecekan ulang. Hal itu tentu di buktikan dengan pernyataan dari Ibu Naning Astuti yang juga selaku pengelola bantuan kartu keluarga sebagai berikut:

“ Dengan adanya bantuan sosial berupa kartu keluarga sejahtera masyarakat merasa terbantu secara perekonomian dan finansial, tetapi jika bantuan tersebut tidak merata pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial. Dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang benar benar membutuhkan bantuan tersebut tetapi tidak terdata di kementrian sosial, oleh sebab itu kami mendata ulang melalui RT dan RW setempat di lakukan pengecekan ulang oleh pihak kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Dari yang sebelumnya hanya 200 kartu keluarga menjadi 480 kartu keluarga. Terjadinya peningkatan ini dari yang hanya 15% menjadi 30% masyarakat yang menerima bantuan kartu keluarga sejahtera tersebut. Tentu saja ini membuat kami mencari apakah ini akurat atau tidak . Setelah itu pihak kecamatan melakukan survey lokasi ternyata memang benar naiknya lebih dari setengah persen. Dan respon masyarakat yang menerima bantuan kartu keluarga tersebut sangat bahagia karena banyak masyarakat kurang mampu yang lebih membutuhkan bantuan tersebut”.  
( Hasil wawancara 9 Maret 2021)

Pernyataan dari Ibu Naning Astuti tersebut menjelaskan bahwa penerima bantuan mengalami kenaikan dari yang 15% menjadi 30% dikarenakan dilakukan perdataan ulang oleh pihak setempat. Pihak RT dan RW yang lebih mengetahui kondisi warganya yang membutuhkan bantuan atau tidak membutuhkan bantuan. Dan respon dari masyarakat itu sendiri tentu saja sangat bahagia karena bantuan tersebut memang mereka butuhkan. Mengingat kondisi perekonomian dan finansial di kategorikan kurang mampu dan layak untuk menerima bantuan kartu keluarga sejahtera. Berdasarkan penilaian tersebut sebagai berikut:

#### 1. Sumber Daya

Tersedianya sumber daya kebijakan itu lewat sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam implementasi KKS di Kecamatan Gayungan. Berdasarkan wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dan non manusia sudah terlaksana sesuai peraturan dan pemerintah kementerian sosial yang bekerja sama dengan agen bank yang telah menyediakan tempat transaksi untuk pencairan dana bantuan pangan non tunai BPNT melalui e-warong. Kesimpulan tersebut didukung oleh pernyataan yang di sampaikan oleh pengelola bantuan Ibu Retno Purwati, S.Sos sebagai berikut:

“Begini mbak, masyarakat Surabaya yang mendapatkan bantuan melalui bank BNI baik dalam bentuk tunai maupun non tunai. Dan pengambilan uangnya itu tidak perlu langsung ke bank BNI melainkan sekarang banyak warong agen bank yang menyediakan tempat untuk melakukan pencairan dana bantuan kartu keluarga sejahtera. Untuk bantuan non tunai bisa langsung pengambilannya berupa uang di e-warong tersebut. Sedangkan untuk bantuan non tunai bisa berbelanja di warong tersebut. Selain itu bantuan ini juga memudahkan masyarakat untuk berbelanja memenuhi kebutuhan pokok. Karena agen e-warong sudah menyediakan berbagai kebutuhan pokok untuk kebutuhan masyarakat”.  
( Hasil wawancara 9 Maret 2021)

Pernyataan dari Ibu Retno Purwati, S.Sos menjelaskan tentang cara masyarakat menerima bantuan kartu keluarga sejahtera melalui bank BNI. Selanjutnya bisa dicairkan melalui agen BNI berupa e-warong yang dekat dengan lokasi tempat tinggal. Kemudian untuk bantuan tunai bisa dilakukan penarikan berupa uang tunai melalui e-warong, sedangkan untuk bantuan tunai yang ingin di gunakan untuk berbelanja kebutuhan pokok bisa langsung di gunakan di e-warong tersebut. Karena e-warong menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok.

## 2. Karakteristik Implementasi

Karakteristik implementasi adalah birokrasi, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik implementasi program kartu keluarga sejahtera (KKS) sudah terlaksana sesuai dengan peraturan, hal ini dilihat dari cara pendamping kks bersikap menginformasikan dan bersosialisasi dengan masyarakat. Pernyataan pendukung disampaikan melalui wawancara dengan pengelola bantuan Ibu Retno Purwati, S.Sos sebagai berikut:

“jadi, pihak kecamatan mempunyai strategi yang di gunakan untuk mengimplementasikan program kartu keluarga sejahtera melalui sosialisasi kepada seluruh penerima bantuan kartu keluarga sejahtera. Sosialisasi tersebut kami sampaikan secara detail, dan penerimaannya juga kami edukasikan secara urut dan terperinci. Mengingat penerima bantuan kartu keluarga sejahtera dari berbagai kalangan seperti adanya lansia. Dalam hal ini pihak kecamatan bekerja sama dengan agen e-warong untuk membantu proses pencairan bantuan kartu keluarga sejahtera. Supaya masyarakat penerima bantuan kartu keluarga sejahtera dapat menerima bantuan secara merata tentunya dengan diawasi oleh pihak setempat”. ( Hasil wawancara 9 Maret 2021)



Pernyataan wawancara dengan pengelola bantuan Ibu Retno Purwati, S.Sos tersebut menjelaskan pentingnya bantuan tersebut sampai ke tangan penerima bantuan kartu keluarga sejahtera. Maka dari itu pihak kecamatan mengimplementasikan program kartu keluarga sejahtera dengan cara sosialisasi kepada seluruh penerima bantuan kartu keluarga sejahtera, dan sosialisai dengan para agen bank e-warong untuk membantu proses transaksi. Setelah bantuan sampai di tangan penerimanya pihak kecamatan selalu mengkoordinasikan pada RT dan RW untuk dilakukan survey lokasi penerima bantuan. Hal semacam itu dilakukan untuk membuktikan bahwa penerima tersebut layak menerima bantuan kartu keluarga sejahtera tersebut.

### 3. Sikap implementasi

Sikap para implementasi yaitu sikap atau cara dalam proses pelayanan terhadap peserta program KKS diantaranya petugas pendamping PKH dan BPNT, pendamping Bank, dan petugas e-warong. Cara mereka memberikan pelayanan terhadap peserta KKS yang ramah, teliti, dan juga sigap menangani setiap keluhan para peserta KKS. Berdasarkan hasil wawancara sikap pelaksana dari implementasi program kartu keluarga sejahtera (KKS) sudah terlaksana sesuai peraturan . hal ini dapat dilihat dari cara pendamping KKS dan petugas e-warong yang bersikap ramah terhadap peserta KKS. Bantuan program keluarga harapan (PKH) maupun bantuan pangan Nontunai (BPNT). Hal ini didukung oleh pernyataan dari pengelola bantuan Ibu Naning Astuti sebagai berikut:

“seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan terkait dalam meningkatkan keefektifitas implementasi kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya yaitu sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan. Tata tertib yang diberikan

oleh pihak kecamatan harus dilaksanakan dengan baik oleh para agen e-warong seperti teliti, ramah, etika, dan sigap dalam membantu masyarakat yang mendapat bantuan kartu keluarga sejahtera. Tentu saja harus ada laporan berkala kepada pihak kecamatan bila terjadi sesuatu. Sigap dalam hal membantu melakukan proses transaksi dikarenakan yang mendapat bantuan kartu keluarga sejahtera dari semua kalangan masyarakat. Untuk memperoleh pelayanan yang baik terkadang kami mengotrol e-warong atau dengan kata lain ikut serta membantu proses transaksi". (Hasil wawancara 9 Maret 2021)

Pernyataan dari pengelola bantuan Ibu Naning Astuti menjelaskan bahwa pihak kecamatan tidak melepaskan tanggung jawabnya kepada agen e-warong melainkan ikut serta membantu proses transaksi secara bertahap, sekaligus menerapkan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap ramah sangat diperlukan dalam proses transaksi, mengingat banyak kalangan yang mendapatkan bantuan kartu keluarga supaya masyarakat yang mendapatkan bantuan terlayani dengan baik.

#### 4. Komunikasi Antar Organisasi dan aktivitas implementasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai sarana untuk menyebar luaskan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah keatas. Setiap program akan dapat dijalankan dengan baik jika terjadi komunikasi yang baik antara pihak pelaksana implementasi program dan sasaran program. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi dan aktivitas implementasi, kepada sasaran belum efektif karena didalam pelaksanaan kebijakan implementasi kartu keluarga sejahtera pemerintah hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan program bantuan tersebut, sehingga masih ada masyarakat yang belum ikut dalam kepesertaan program KKS ini sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Kemudian setelah dilakukan perdataan ulang

bantuan kartu keluarga sejahtera jauh lebih baik dan bantuan sampai dengan merata.

Hal semacam ini didukung oleh pernyataan dari pengelola bantuan Ibu Retno

Purwati, S.Sos sebagai berikut:

“jadi begini mbak dimasyarakat timbul kecemburuan sosial itu karena masyarakat inginkan adalah program bantuan kartu keluarga sejahtera itu dikira nya dapat semua. Padahal dilingkungan tempat tinggalnya tergolong mampu tetapi minta ingin mendapatkan bantuan. Jelas saja hal semacam itu di tolak oleh pihak RT atau RW setempat apalagi oleh pihak kecamatan. Sehingga masyarakat itu berargumentasi macam macam. Seperti yang pernah di jelaskan sebelumnya bahwa pemberian bantuan pertam kalinya menganut program perdataan perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada perintah dari pusat bahwa bantuan di data secara merata melalui RT dan RW dan dikoordinasikan oleh pihak kecamatan. Semenjak saat itu masyarakat sambil di edukasi bahwa bantuan ini untuk siapa akhirnya masyarakat memahami dan tidak lagi berargumentasi macam macam”. (Hasil wawancara 9 Maret 2021)

Pernyataan yang di sampaikan oleh Ibu Retno Purwati, S.Sos menjelaskan bahwa masyarakat perlu diedukasi terlebih dahulu supaya tidak terjadi kecemburuan sosial akibat tidak menerima bantuan sosial kartu keluarga sejahtera. Setelah di data ulang dan di sosialisasikan masyarakat mengerti kategori yang berhak menerima bantuan sosial itu dan tentunya dengan bantuan pihak RT dan RW yang membantu mengedukasi masyarakatnya.

##### 5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi lingkungan didalam kawasan Kecamatan Gayungan didominasi oleh perumahan, Kos, dan Kontrakan yang padat berdekatan antara rumah yang satu dengan yang lain atau dengan kata lain kawasan padat penduduk. Kawasan ini termasuk wilayah dataran rendah, terletak di dalam tengah kota. Dari kondisi ini kita bisa melihat tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Gayungan masih tergolong

Prasejahtera. Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan di kawasan Kecamatan Gayungan merupakan kawasan Kecamatan Gayungan merupakan kawasan permukiman padat penduduk, kondisi lingkungan yang rawan banjir ketika musim hujan, serta masih tergolong kawasan Prasejahtera hal ini dapat dilihat dari jumlah penerima program KKS sejumlah 480 KK (Kepala Keluarga). Hal ini dijelaskan oleh pernyataan Ibu Naning Astuti sebagai berikut:

“jadi begini di lingkup wilayah Gayungan ini masih banyak keluarga prasejahtera dalam artian dimana keadaan belum mencapai kesejahteraan. Disisi lain keluarga prasejahtera ini mengajak memanfaatkan sumber daya manusianya untuk selalu menghilangkan stigma negatif di masyarakat terhadap keberadaan bantuan kartu keluarga sejahtera ini. Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi juga menekankan bahwa keluarga penerima manfaat atau KPM kartu keluarga sejahtera harus bisa mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial kartu keluarga sejahtera. Selain itu juga keluarga penerima manfaat harus mempunyai usaha sendiri sebagai upaya keluar dari masalah kemiskinan. Selain itu para penerima bantuan akan di berikan pendamping untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat memajukan sumber daya manusia untuk membuka usaha seperti berjualan gorengan, membuat usaha supaya tidak bergantung pada bantuan, yang nantinya banyak masyarakat di Surabaya yang mundur dari program bantuan karena masyarakatnya sudah bisa hidup sejahtera. Melalui bantuan sosial ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan keluarga penerima manfaat akan pentingnya pemanfaatan bantuan sosial untuk memperbaiki gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak mulai dari janin hingga balita untuk pecegahan stunting.( Hasil wawancara 9 Maret 2021)

Dari pernyataan Ibu Naning Astuti menjelaskan bahwa bantuan sosial ini di berikan kepada masyarakat untuk mendukung perekonomian membangun sumber daya manusia yang lebih tangguh. Dengan di berikannya pembelajaran dan pembinaan kepada masyarakat secara gratis untuk masyarakat yang menerima bantuan maka masyarakat akan termotivasi untuk membangun sumber daya

manusianya. Guna untuk meningkatkan perekonomian secara finansial. Sehingga masyarakat yang sudah sejahtera dan mampu meningkatkan perekonomian bisa mundur dari penerima bantuan sosial tersebut. Jika masyarakatnya sejahtera tentu ini merupakan kabar baik untuk pemerintah dalam mengawasi penggunaan dana bantuan kartu keluarga sejahtera, supaya tidak terjadi penyalagunaan keuangan. Pemanfaatan bantuan sosial yang dimaksud dalam konteks perbaikan gizi adalah pemanfaatan produk bantuan pangan non tunai berupa telur. Telur merupakan sumber protein hewani yang perlu di konsumsi ibu hamil, bayi, dan balita agar terhindar dari efisiensi kalori dan protein yang dapat menyebabkan stunting.

Selain asupan gizi, pemantauan tumbuh kembang anak melalui pemanfaatan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) juga perlu di lakukan secara rutin. Untuk itu pemerintah, melalui program keluarga harapan menjadikan ini sebagai salah satu syarat bagi keluarga penerima manfaat untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut.

Menurut Friendlander & Apte dalam Fahrudin (2014) kesejahteraan sosial adalah Kesejahteraan masyarakat kurang mampu atau miskin sebagai variabel terikat dalam penelitian ini, dan untuk mengukur sebagai acuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu atau miskin di kecamatan Gayungan menggunakan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Friendlander & Apte dalam Fahrudin diantaranya adalah:

1. Fungsi Pencegahan (Preventive)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam

masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial dan memanfaatkan bantuan sosial. Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa. Fungsi pencegahan yang dilaksanakan melalui pemberian bantuan dan pemanfaatan bantuan sosial telah dilaksanakan melalui implementasi program KKS yang diberikan kepada masyarakat miskin atau keluarga penerima manfaat (KPM) dan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari program tersebut yang mendapat dukungan penuh dari masyarakat lingkungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Pernyataan dari salah seorang masyarakat yang menerima bantuan kartu keluarga sejahtera sebagai berikut:

“saya senang mbak menerima bantuan kartu keluarga sejahtera ini, dimana program ini sangat membantu perekonomian keluarga. Bisa untuk tambahan membayar sekolah dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Terkadang uang bantuan ini saya sisihkan untuk membuat usaha dirumah. Saya mendapat motivasi dari pembelajaran dari pendamping supaya tidak terus menerus bergantung pada bantuan sosial kartu keluarga sejahtera. Disisi lain saya juga berusaha mencari jalan keluar untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan berjualan pop ice dan sosis. Meski hasilnya tidak seberapa setidaknya bisa untuk menutup kebutuhan rumah tangga.” (Wawancara 10 Maret 2021)

Dari pernyataan tanggapan seorang keluarga penerima manfaat di atas bahwa masyarakat senang menerima bantuan tersebut. Pada saat tekanan kebutuhan hidup yang dialami hanya bersifat temporer atau berjangka pendek, memang bentuk-bentuk bantuan sosial seperti penyaluran bantuan sembako,

modal dan lain sebagainya akan banyak bermanfaat mengurangi kadar kerentanan keluarga miskin yang membutuhkan. Tetapi, lain soal ketika tekanan kebutuhan hidup dan situasi krisis yang dialami ternyata berlangsung panjang, seperti pandemi covid-19.

## 2. Fungsi Penyembuhan (Curative)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi). Peningkatan dalam bidang kesehatan, peningkatan dalam bidang pendidikan, peningkatan dalam bidang ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan masyarakat penerima KKS diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, fungsi menyembuhkan baik dalam meningkatkan bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi melalui program KKS ini, dampak dari implementasi KKS sudah dirasakan oleh keluarga penerima manfaat (KPM), hal ini berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan adanya bantuan program KKS ini. Tentu saja alasan itu merujuk pada pernyataan Ibu Naning Astuti sebagai berikut:

“jadi strategi yang di gunakan oleh Kecamatan Gayungan Kota Surabaya untuk mengawasi penggunaan dana kartu keluarga ini berhasil. Seperti salah satu contoh yaitu Ibu Kasti yang merupakan salah satu penerima program manfaat dari kecamatan Gayungan Kota Surabaya pada tahun 2015 lalu. Kasti sendiri mengaku berat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sebelum mendapatkan bantuan kartu keluarga sejahtera berupa PKH dari pemerintah. Dan beliau sekarang bersyukur dengan adanya bantuan ini sehingga bisa meringankan biaya sehari-hari. Menurut beliau jika di bilang kurang memang kurang karena penghasilan suami tidak cukup untuk biaya sehari-hari. Tetapi tekad Bu Kasti sangat kuat untuk mengubah nasib keluarganya. Beliau tidak pernah absen dalam

pertemuan kelompok yang diadakan oleh pendamping bantuan di dusunnya. Berbagai pengetahuan beliau peroleh dalam pertemuan tersebut. Kebetulan mbak fitri yang memberikan pendamping kepada Ibu Kasti. Dalam setiap pertemuan kelompok selalu di sampaikan bahwa bantuan sosial kartu keluarga sejahtera ini selain untuk kebutuhan sekolah anak, apabila memiliki sisa bisa digunakan untuk menambah modal usaha. Selang lima bulan setelah menerima bantuan sosial kartu keluarga sejahtera, Ibu kasti membuka usaha berjualan makanan kecil seperti gorengan, dawet, dan sosis di depan rumahnya dengan bermodalkan meja kecil. Dan alhamdulillah usahanya sekarang menjadi besar sehingga secara sukarela beliau mengajukan diri untuk keluar dari keluarga penerima manfaat pada kartu keluarga sejahtera. Beliau berharap langkahnya diikuti keluarga penerima manfaat kartu keluarga sejahtera lainnya sehingga masyarakat yang tidak mampu tetapi belum mendapatkan bantuan kartu keluarga sejahtera bisa merasakan bantuan tersebut". (Wawancara 9 Maret 2021)

Dari pernyataan diatas di jelaskan bahwa program bantuan kartu keluarga sejahtera ini menjadi jalan dan bimbingan bagi masyarakat untuk membuka usaha sehingga kedepannya tidak bergantung pada bantuan kartu keluarga sejahtera. Selain itu masyarakat bisa mandiri dalam meningkatkan perekonomian keluarga secara finansial. Tentu saja hal tersebut sangat bagus dan keluarga penerima manfaat yang mengundurkan diri bisa di berikan kepada masyarakat yang kurang mampu lainnya yang belum terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat pada kartu keluarga sejahtera.

### 3. Fungsi pengembangan (Development)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat. Perubahan pola pikir masyarakat dan perubahan kondisi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi pengembangan baik dalam perubahan pola pikir



dan kondisi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan perubahan sistem perbankan melalui program KKS ini. Memberikan bantuan sosial melalui sistem perbankan dan pemanfaatan bantuan sosial melalui buku tabungan, serta e-warong yang akan digunakan sebagai tempat pengambilan bantuan program KKS ini.

#### 4. Fungsi Penunjang (Supportive)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. Program memperhatikan aspek berkelanjutan dan peningkatan produktivitas masyarakat miskin. Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa fungsi penunjang program kartu KKS ini, digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya guna memperhatikan aspek berkelanjutan dan kelangsungan kebutuhan hidup pada masa yang akan datang.

### **4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gayungan Kota Surabaya**

Faktor yang menjadi penghambat Implementasi program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gayungan Kota Surabaya akan dideskripsikan berdasarkan Model Implementasi Van Metter dan Van Horn adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu:

#### **4.2.1 Hambatan Faktor Ukuran Dan Tujuan Program**

Ukuran dan tujuan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) secara khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan memperluas manfaat dari berbagai bantuan sosial (Bansos) seperti PKH dan bantuan pencairan bansos KKS ini

menggunakan buku tabungan dan kartu ATM KKS adalah upaya mengajak masyarakat untuk berkenalan dengan perbankan. Dalam mengimplementasikan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ukuran dan tujuan program ialah menjadi penentu akan keberhasilan suatu program. Seperti yang disampaikan pernyataan Ibu Retno Purwati,S.Sos sebagai berikut:

“Jadi seperti yang pernah di sampaikan oleh Mentrei Sosial Ibu Tri Rismaharini tepatny apada bulan januari 2021. Sehubungan dengan adanya pandemi covid-19 yang telah mewabah diseluruh wilayah Indonesia, maka keluarga penerima manfaat atau KPM bansos dapat mencairkan dana bantuan melalui bank atau bisa melalui e-warong terdekat. Jika ada keluarga penerima manfaat yang mengalami sakit sehingga tidak bisa mencairkan melalui bank. Maka pihak bank akan mengantar menuju rumahnya. Hal tersebut di lakukan supaya bantuan sampai secara tepat. Selain itu bantuan yang sekarang pencairannya melauai bank dikarenakan untuk memperkenalkan kepada masyarakat yang belum mengetahui dunia perbankan menjadi mengerti. Sehingga cara tersebut di lakukan untuk meminimalisir tidakan korupsi oleh oknum oknum yang tidak amanah kepada keluarga penerima manfaat atau KPM”. (waancara 9 maret 2021)

Dari pernyataan di atas dijelaskan bahwa pihak kecamatan menjalankan tugas dari pemerintah pusat sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan dari kementrian sosial. Dikarenakan jika di lakukan pencairan bantuan secara langsung terkadang ada salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadinya korupsi. Disamping itu dengan adanya percairan melalui dunia perbankan lebih cepat dalam penerimaan bantuan karena tidak melalui banyak perantara hanya sosialisasi saja. Masyarakat yang belum mengetahui dunia perbankan menjadi lebih tau dan sama sama memberi tahu bagi yang sudah mengetahui, dikarenakan ada banyak lansia yang belum mengerti sehingga membutuhkan arahan dari banyak pihak. Terutama bagi pihak kecamatan untuk selalu berkontribusi dalam membantu pencairan bantuan kartu keluarga sejahtera tersebut.

#### **4.2.2 Hambatan Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas pihak Implementasi**

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi dan aktivitas pihak implementasi, kepada sasaran belum efektif dan mengalami hambatan, karena dalam proses implementasi program kartu keluarga sejahtera pemerintah hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan program bantuan tersebut, sehingga masih ada masyarakat yang belum ikut dalam kepesertaan program KKS ini sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

#### **4.2.3 Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayungan**

Program Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat KKS. KKS juga dikatan sebagai Program yang memberikan bantuan langsung tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Miskin yang telah ditetapkan sebagai peserta KKS dan diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Penerima bantuan program Kartu Keluarga Sejahtera ( KKS ) berupa :

**Tabel 4.1**

**Jumlah Dana Bantuan Masyarakat Penerima Bantuan KKS**

<b>NO</b>	<b>JENIS BAHAN</b>	<b>JUMLAH BANTUAN</b>
1	Bantuan Tetap KKS	Rp 550.000,- / Tahun
2	Bantuan Tetap Akses	Rp 1.000.000,- / Tahun
3	Lanjut Usia ke Atas 60 Tahun	Rp 2.400.000,- / Tahun
4	Penyandang Disabilitas	Rp 2.400.000,- / Tahun
5	Bantuan Anak Usia Dini ( 0 – 6 Tahun )	Rp 2.400.000,- / Tahun
6	Anak peserta Pendidikan (SD/Mts/Paket A/SDL)	Rp 2.400.000,- / Tahun
7	Anak peserta Pendidikan ( SMP/Mts/Paket B )	Rp 900.000,- / Tahun
8	Bantuan Pendidikan Anak SMA	Rp 1.500.000,- / Tahun
9	Bantuan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 2.400.000,- / Tahun

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Kartu Keluarga Sejahtera bahwa yang mendapatkan sasaran KKS merupakan keluarga dan atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, merupakan komponen kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial.

Di Kota Surabaya juga mempunyai daftar nama orang orang yang terdaftar dalam Program Kartu Keluarga Sejahtera ini di setiap Kecamatan dan Kelurahan. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Andika salah satu warga di kelurahan Dukuh Menanggal, masyarakat yang mendapatkan bantuan KKS ini sangat membantu kelangsungan

hidupnya, karena bantuan yang diterima berupa uang yang di terima seriap 1x dalam 3 bulan dapat digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari. Dengan adanya KKS ini menuju Indonesia yang sejahterah atau memakmurkan kehidupan bangsa. Tujuan dari KKS untuk mengubah kehidupan keluarga penerima manfaat KKS. Selain itu, masyarakat Kecamatan Gayungan yang terdaftar dalam data keluarga penerima manfaat KKS ini di berikan datanya oleh Kelurahan masing-masing. Dan setelah itu barulah Dinas Sosial menginput data dan mengirim data tersebut ke pusat.

Masyarakat di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, yang mendapat bantuan KKS sebanyak 59 (Emat puluh sembilan) orang Dimana diantaranya, yaitu :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah orang yang mendapatkan bantuan KKS**  
**Di Kelurahan Dukuh Menanggal**

<b>NO</b>	<b>Kriteria Penerima KKS</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pendidikan	25 Orang
2	Kesejahteraan Sosial	34 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>59 Orang</b>

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa masyarakat di Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan yang mendapatkan bantuan KKS berjumlah 59 orang. 25 orang yang mendapatkan KKS untuk kriteria pendidikan, yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA sederajat. 34 orang yang mendapatkan KKS untuk kriteria kesejahteraan sosial yang terdiri dari lansia yang berumur 60 tahun keatas.

Seperti wawancara penulis dengan Pak Fahrul, ia mengatakan “masyarakat yang mendapat KKS di Kelurahan Dukuh Menanggal yang mendapatkan bantuan KKS dapat dikatakan masyarakat miskin atau tidak mampu, dan sebelum adanya KKS masyarakat tersebut secara terus menerus mendapatkan bantuan dari Kelurahan. Baik itu bantuan berupa uang, bahan-bahan sembako lainnya dan peralatan sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu. Oleh karena itu, para perangkat di Kelurahan di Kelurahan Dukuh Menanggal tidak kesulitan mendata ulang masyarakat yang kurang mampu.”

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Adapun penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Selain itu menurut (Pak Andika), dengan adanya bantuan uang yang diterima setiap 1 kali dalam 3 bulan oleh penerima manfaat KKS khususnya lansia berumur 60 tahun keatas ini dapat membantu kehidupannya.

Kemudian wawancara dengan Ibu (Jo Sia), umur 75 tahun, dia mengatakan bahwa dengan adanya KKS yang diterima sekali dalam 3 bulan ini sangat membantunya dalam memenuhi kebutuhannya, yang terpenting kebutuhan pangan. Ibu Jo Sia setelah mendapatkan dana bantuan KKS langsung membelikan beras dan bahan-bahan pangan lainnya. Uang yang

diterima setiap sekali dalam 3 bulan sebanyak Rp. 500.000,- dan kadang Rp.750.000,- dan Rp. 1.100.000,-. Selain itu, wawancara Ibu (Sakima), umur 65 tahun, mengatakan bahwa dengan adanya KKS yang diterima setiap 1 kali dalam 3 bulan ini bisa membantunya dalam melangsungkan kehidupannya. Uang yang diterima oleh Ibu Sakima di gunakannya untuk keperluan sehari-hari dan sisanya digunakannya untuk modal bercocok tanam sayuran. Melanjutkan wawancara dengan Ibu (Nurmiati), yang berumur 72 tahun dan Ibu (Roslima), ia mengatakan bantuan yang diterima bukan hanya uang, tetapi setiap bulannya mendapatkan telur dan bahan pokok lainnya.

Berdasarkan pasal 8 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Kartu Keluarga Sejahtera bahwa keluarga penerima manfaat KKS berdasarkan kriteria komponen kesejahteraan sosial mendapat kewajiban untuk melaksanakan komponen yang berupa:

- Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun.
- Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Menurut Muchsan pembatasan penggunaan Freies Ermessen adalah sebagai berikut:

- Penggunaan Freies Ermessen tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif).
- Penggunaan Freies Ermessen hanya ditujukan demi kepentingan umum.

Wawancara dengan Ibuk Roslima, Ibu Nurmiati, Ibu Jo Sia, dan Ibu Sakima, mereka sama-sama menyatakan bahwa tidak ada terlaksananya pemeriksaan kesehatan sekali dalam setahun. Selama mendapatkan bantuan KKS mereka hanya mendapatkan batuan berupa uang tunai setiap 1 kali dalam 3 bulan dan mendapatkan bahan-bahan sembako lainnya setiap 1 kali dalam 1 bulan.

**Tabel 4.3**

**Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan  
Tentang Masyarakat yang mendapatkan Batuan Kesejahteraan  
Sosial Di Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan**

<b>NO</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
1	Mendapatkan	59	44 %
2	Tidak Mendapatkan	76	56%
<b>Jumlah</b>		<b>135</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas pelaksanaan pemeberian bantuan kesejahteraan sosial di Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan yang mendapatkan bantuan KKS sebanyak 59 orang, dengan persentase 44%, dan yang tidak mendapatkan sebanyak 76 orang, dengan persentase 56%. Maka dapat disimpulkan masih banyak masyarakat di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan yang belum mendapatkan bantuan KKS, khususnya kesejahteraan sosial.



**Tabel 4.4**

**Tanggapan Responden Mengenai Tentang Membantu/Tidak  
Kehidupan Masyarakat dengan Mendapatkan Bantuan  
Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Dukuh Menanggal**

<b>NO</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
1	Membantu	12	20,6%
2	Tidak Membantu	28	79,4%
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas, bantuan KKS yang diterima dapat membantu masyarakat kesejahteraan sosial di Kelurahan Dukuh Menanggal khususnya kriteria kesejahteraan sosial, jawaban responden bantuan KKS dapat membantu sebanyak 12 orang, dengan pesentase 20,6%, dan yang tidak membantu responden sebanyak 28 orang, dengan persentase 79,4%. Maka dapat disimpulkan masih banyak masyarakat yang belum terbantu oleh KKS di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan yang belum mendapatkan bantuan KKS, khususnya kesejahteraan sosial.

Wawancara dengan Bapak Impis (Ketua RW) “Pelaksanaan kesejahteraan sosial dalam Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini belum termasuk secara keseluruhan oleh Dinas Sosial di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Karena masih banyak masyarakat di Kelurahan Dukuh Menanggal yang belum mendapatkan bantuan KKS

khususnya Kriteria Kesejahteraan Sosial. Karena ±50 (limah puluh) orang lansia yang berumur 60 tahun keatas dan 3 orang penyandang disabilitas, satu diantaranya penyandang disabilitas berat.”

Menurut hasil wawancara peduli dengan (Pak Fahrul), ia mengatakan “sampai saat ini Dinas Sosial belum ada melakukan survei kembali mengenai KKS tersebut, karena masyarakat yang mendapat KKS tersebut di data pada tahun 2017 yang mendapatkan bantuan di Kelurahan Dukuh Menanggal dan data tersebut yang dijadikan sebagai data penerima bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut.

Sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia termuat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-2 (dua) yang berbunyi “Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan trakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”. Kata “kemakmuran” diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia baik material maupun spiritual, jasmaniah maupun rohaniah. Secara lebih luas kemakmuran diartikan tercapainya tingkatan harkat dan martabat manusia yang lebih tinggi yang meliputi unsur kodrat manusia.

Agar terciptanya cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka harus dilakukan tindakan dan kebijakan-kebijakan yang tepat oleh pemerintah. Agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Candler dan Plano dalam Hesel Nogi S. Tangkilisan, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Pendapat lain menyatakan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Anderson memberikan defenisi

kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, yang membawa implikasi :

- Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi kepada tujuan.
- Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

#### **4.2.4 Dampak Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan**

Hukum atau aturan dibuat mempunyai tujuan dan melalui kajian yang sangat mendalam agar pencapaian dari tujuan hukum itu terlaksana dengan baik. Menurut Subekti tujuan dari hukum adalah hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang pada intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan ini digambarkan pada suatu keseimbangan yang membawa ketentraman didalam hati orang yang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan. Kaidah ini menurut “dalam keadaan yang sama dan

setiap orang mendapat bagian yang sama pula. Adapun dampak dari tidak terlaksananya pemberian bantuan kesejahteraan sosial secara merata berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Dukuh Menanggal yaitu sebagai berikut:

#### **4.2.5 Keterbatasan Penerima Bantuan Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.**

Wawancara dengan Ibuk Neti (masyarakat), ia mengatakan “bahwa sedikit jumlah lansia yang mendapatkan bantuan KKS, diharapkan agar pemerintah memperhatikan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini dikarenakan lansia yang berumur 60 tahun ke atas tidak mempunyai kekuatan untuk mencari nafkah karena tubuh mereka sudah rentan.”

Hasil wawancara dengan (Pak Andika), ia mengatakan bahwa “masyarakat yang sudah terdaftar dalam program bantuan KKS tidak akan ditambah kuota lagi, baik itu di tingkat pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial. Karena data yang sudah di input ke pusat tidak dapat di rubah lagi. Kecuali, apabila ada salah satu anggota KKS yang sudah lulus Sekolah Menengah atas untuk kriteria pendidikan dan ada anggota KKS yang meninggal dunia di kriteria kesejahteraan sosial maka data tersebut bisa dirubah kembali.”

Data yang mereka dapat adalah data yang diterima langsung dari Kelurahan. Kemudian Kelurahan yang terlebih dahulu menentukan dan menyeleksi siapa saja yang akan mendapatkan bantuan KKS tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul (Ketua RT) dan Bapak Impis (Moderator Kampung di salah Satu Kelurahan Dukuh Menanggal), mengatakan bahwa “Kelurahan terlebih dahulu bermusyawarah. Musyawarah yang dilakukan di hadiri oleh para perangkat Kelurahan yang ada di Kelurahan Dukuh Menanggal. Dari hasil musyawarah tersebut, mereka menyimpulkan bahwa sudah ada nama-nama masyarakat yang dikatakan Ruma Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang setiap tahunnya mendapatkan bantuan sebelum adanya bantuan KKS tersebut. Jadi data itulah yang mereka berikan ke Dinas Sosial sebagai masyarakat yang mendapatkan Bantuan KKS tersebut.”

Kuota untuk penerima KKS kesejahteraan sosial seharusnya di tambah dari tahun ke tahun. Agar terjadinya kesamarataan hak untuk lansia berumur 60 tahun ke atas mendapatkan bantuan dan bisa membantu kebutuhan lansia berumur 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas.

Hasil wawancara dengan Ibuk Elan (disabilitas), “bantuan KKS juga tidak memperhatikan penyandang di sabilitas, padahal penyandang disabilitas di Kelurahan Dukuh Menanggal termasuk penyandang disabilitas berat. Tapi tidak ada kepedulian pemerintah untuk menangani penyandang disabilitas membuat penyandang disabilitas tidak terbantu, baik dalam bantuan uang ataupun manfaat KKS lainnya. Sekurang kurangnya jika penyandang disabilitas mendapat bantuan KKS itu membantu keluarga dalam biaya.

Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan haknya. Di dalam UUD 1995 ditulis mengenai hak-hak warga negara, salah satunya kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan kekerasan serta diskriminasi. Hak adalah suatu wewenang atau kekuasaan yang berikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi

oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diberikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima.

#### **4.2.6 Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Proram Bantuan KKS khususnya Kriteria Kesejahteraan Sosial.**

Hasil wawancara dengan Pak Andika (Pendamping KKS), mengatakan “bahwa di saat sosialisai Dinas Sosial ke Kelurahan Dukuh Menanggal, hanya sedikit sekali masyarakat yang hadir. Pasa saat sosialisasi di Kelurahan Dukuh Menanggal yang hadir hanya 25 orang. Karena kesibukan masyarakat Kelurahan Dukuh Menanggal, jadi mereka menganggap sosialisasi itu tidak terlalu penting. Dan lebih mengutamakan pekerjaan sehari-hari demi mencari uang.”

Dari hasil wawancara dengan 26 orang lansia yang berumur 60 tahun keatas dan 1 orang penyandang disabilitas. Mereka mengetahui apa itu KKS. Tetapi hanya sebagian yang tahu kriteria apa saja yang termasuk dalam KKS tersebut. Karena mereka tidak tau untuk siapa saja KKS tersebut.

Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan dari otonomi daerah pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian otonomi daerah cenderung merupakan kewajiban dari pada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan dengan mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual.

Oleh karena itu, tidak berjalan sepenuhnya program KKS di Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, karena tidak sesuai dengan tujuan KKS itu sendiri, yaitu:

- Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan
- Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

#### **4.2.7 Tidak Berjalannya Kewajiban Penerima KKS Khususnya Kriteria Kesejahteraan Sosial**

Komponen kesejahteraan sosial dengan ketentuan harus:

- Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Hasil wawancara dengan Ibu Jo sia, ibu Nurmiati, Ibu Rosli dan ibu Sakima, ia mengatakan “selama mendapatkan bantuan KKS beliau belum pernah mendapat pemeriksaan 1 kali dalam 1 tahun oleh. Dan Ibu Rodiah juga tidak mengetahui hal tersebut. Yang Ibu Jo Sia tahu hanya pemberian bantuan uang yang ia dapatkan 1 kali dalam 3 bulan dan sembako lainnya yang ia terima selama 1 kali dalam 1 bulan.”

Dengan tidak berjalannya kewajiban yang diterima bantuan kesejahteraan sosial, hal ini tidak lepas dari pemerintahnya, pemerintah dikatakan baik jika produktivitas bersinergi dengan meningkatkan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spritualnya.

Lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera, lingkungan hidup menjadi sumber dan penunjang hidup. Dengan demikian lingkungan dapat memberikan kesejahteraan dalam masyarakat.

Sosial Notowidagdo berpendapat bahwa sejahtera adalah aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Selain itu, menurut Suharto kesejahteraan sosial mencakup tiga konsepsi dasar yaitu:

- Kondisi kehidupan atau sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhankebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
- Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- Aktivitas, yakni suatu kekuatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.



### **4.3 Upaya meningkatkan keefektifan implementasi kebijakan kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya**

#### **4.3.1 Mekanisme dalam melaksanakan prosedur pembuatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gayungan Kota Surabaya**

Bantuan kartu keluarga sejahtera ini kira kira tahun ini dimulai pada bulan januari 2021 hingga desember 2021 nantinya, bantuan sosial atau sering disebut dana bansos akan disalurkan kembali seperti sedia kala. Dikarenakan menurut kementerian sosial bantuan sosial yang kini disebut sebut dengan kata lain bantuan pangan non tunai atau sering di sebut BPNT nantinya tidak akan lagi disalurkan berupa bentuk barang atau fisik seperti beras,telur dan lain sebagainya. Tetapi akan di berikan dalam bentuk uang sesuai dengan jumlah anjuran yang di tetapkan oleh pemerintah sejumlah Rp 550.000, kepada keluarga penerima manfaat atau sering di sebut dengan KPM.

Bantuan sosial non tunai juga bisa disebut sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat oleh pemerintah maka dari itu masyarakat yang sudah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau sering disebut dengan KPM yang sudah terdaftar dalam data di kementrian atau data terpadu keluarga sosial. Selain terdaftar dalam kementrian data keluarga sosial terpadu untuk masyarakat yang menerima bantuan sosial ini juga harus terdaftar pada kartu keluarga sejahtera. Supaya bisa memperoleh dana bantuan sosial atau disebut dengan

bansos. Untuk itu bagi masyarakat yang ingin mendaftar kartu keluarga sejahtera akan di jelaskan oleh Bapak Andika selaku (pendamping KKS).

“Begini caranya supaya dapat terdaftar dalam program bantuan kartu keluarga sejahtera pada kementerian data terpadu keluarga sosial. Untuk yang pertama peserta keluarga penerima manfaat atau sering disebut KPM harus mendaftar pada RT/RW atau kantor kelurahan atau desa setempat pada lingkungan tempat tinggalnya. Setelah itu barulah dapat dinyatakan sebagai calon peserta keluarga penerima manfaat dan akan menerima surat pemberitahuan. Setelah itu keluarga penerima manfaat akan menerima pemberitahuan yang isinya berisi tentang teknis pendaftaran di tempat yang sudah di tentukan. Selanjutnya keluarga penerima manfaat atau KPM harus membawa dokumen pelengkap lain yang telah di siapkan. Jika data sudah akurat dan lengkap maka selanjutnya akan di proses oleh himpunan bank milik negara atau himbara, kelurahan dan bahkan kantor walikota atau kabupaten. Apabila data sudah terverifikasi selanjutnya keluarga penerima manfaat akan menerima rekening bank. Dan yang terakhir keluarga penerima manfaat akan diberikan kartu keluarga sejahtera atau KKS yang sudah tercetak dalam bentuk kartu. Jadi mirip seperti halnya atm yang membutuhkan mesin EDC untuk melakukan penarikan. Untuk dokumen pelengkap lainnya sebagai syarat untuk mendaftar kartu keluarga sejahtera berupa kartu tanda penduduk atau KTP, nomer induk kartu keluarga atau disebut dengan NIK, kartu keluarga atau KK dan kode unik keluarga dari tada terpadu”. ( Hasil wawancara 9 Maret 2021)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa syarat untuk mengurus atau mendaftar kartu keluarga sejahtera cukup mudah dan tidak menyulitkan masyarakat. Apalagi membebani masyarakat yang belum bisa untuk mengurus kartu keluarga sejahtera. Lalu setelah mendaftar masyarakat atau keluarga penerima manfaat juga harus bisa mengakses atau mengeceknya. Sehingga untuk meminimalis kesalahan atau jika ada pemberitahuan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Andika (selaku Pendamping KKS).

“ untuk mengecek nama keluarga penerima bansos atau bantuan pangan non tunai dari kartu keluarga sejahtera yaitu melalui situs kementerian sosial yaitu membuka situs web [dtkns.kemensos.go.id](https://dtkns.kemensos.go.id). setelah itu pilih ID kepesertaan yang sesuai dengan keluarga penerima manfaat atau KPM. Masukkan nomor kepesertaan dari ID yang sudah di pilih atau bisa juga

menggunakan informasi berupa kartu tanda kependudukan atau sering kita sebut KTP. Setelah itu input nama yang sesuai dengan ID yang sudah di pilih. Lalu masukkan kode yang sudah terverifikasi lalu pilih menu cari. Selanjutnya untuk yang terakhir akan muncul pada keterangan apabila ID milik keluarga penerima manfaat sudah diinput tersebut masuk terdaftar atau belum pada kementerian data terpadu pada kementerian sosial”. ( Hasil wawancara 9 Maret 2021)

Dari pernyataan diatas dapat di ketahui bahwa pemerintah transparan dalam memberikan bantuan, dan meminta masyarakat untuk lebih aktif didalam mencari informasi, supaya tidak terjadi kesalahan informasi oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab dan memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri. Selain itu masyarakat lebih mengetahui tentang teknologi dan meningkatkan budaya membaca terlebih dahulu bagi masyarakat indonesia.

Ada beberapa hal penting yang harus diketahui dan di perhatikan oleh keluarga penerima manfaat atau KPM yaitu bahwa sistem kepesertaan keluarga penerima manfaat atau KPM untuk kartu keluarga sejahtera tidak dapat di lakukan dengan sistem online melainkan secara offline. Dikarenakan jika menggunakan sistem online pemerintah tidak mengetahui dengan benar apakah data tersebut nyata atau hanya dibuat buat untuk merugikan negara. Untuk itu pendaftaran dilakukan secara offline karena yang benar benar mengetahui tentang kondisi sebenarnya di lapangan adalah perangkat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andika(selaku pendamping KKS)

“Bantuan sosial ini merupakan bantuan yang tak berwujud atau dalam bentuk uang tunai. Dan untuk proses pendaftarannya sendiri tidak bisa melalui online, dikhawatikan dapat terjadi kecurangan atau bahkan membuat masyarakat yang seharusnya berhak menerima tetpai belum mengerti teknologi tidak mendapatkan bantuan sosial ini. Dan untuk masyarakat yang jago dalam hal teknologi mendapatkan bantuan yang sangat besar dengan mendaftarkan seluruh anggota keluarganya. Dan hal

tersebut dapat merugikan uang negara karena bantuan tidak tepat sasaran. Untuk itu bantuan dibuat offline supaya pihak pemerintah juga bisa mengecek apakah kebenaran orang ini dapat menerima bantuan sosial kartu keluarga sejahtera KKS atau belum layak”. ( Hasil wawancara 9 Maret 2021)

Sedangkan untuk dana bantuan sosial non tunai akan di transferkan secara langsung tanpa melalui perantara ke nomor rekening pemilik kartu keluarga sejahtera yang terdaftar. Untuk penyaluran dana bantuan sosial atau bansos akan di keluarkan melalui empat bank sebagai penyalur himpunan bank negara atau sering di denga HIMBARA. Seperti bank rakyat Indonesia (BRI), bank mandiri, bank negara indonesia (BNI), dan bank tabungan negara (BTN). Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kecurangan dalam pembagian dana bantuan sosial dan meminimalisir korupsi yang terjadi diindonesia, serta lebih efisiensi waktunya. Hal ini didukung oleh pernyataan bapak andika (selaku pendamping) dalam wawancaranya.

“seperti yang kita tahu yaa banyak sekali kejahatan didunia ini yang tidak seharusnya dilakukan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti memanipulasi data bantuan dan memasukkan ke kantong sendiri, untuk mengambil dana bantuan di kenakan admin untuk biaya ini itu dan yang lainnya. Maka dari itu untuk menghindari hal hal yang kejahatan semacam itu maka pemerintah membuat peraturan baru supaya dalam penerimaan bantuan tidak terjadi pungli atau sejenisnya. Untuk itu kita harus lebih banyak belajar tentang dunia elektronik dan perkembangan elektronik lainnya supaya tidak terjadi hal yang dapat merugikan keluarga penerima manfaat. Untuk pengambilan bantuan sosial melalui bank bank milik negara contohnya bank BRI, bank BNI, bank BTN. Selain bank tersebut aman juga bank bank tersebut banyak kita jumpai di wilayah seluruh indonesia.” ( Hasil wawancara 9 Maret 2021)

Selain itu untuk masyarakat yang jaboritabek tidak perlu khawatir akan pengiriman bantuan sosialnya. Dikarenakan untuk wilayah jaboritabek akan menerima bantuan langsung dan di salurkan oleh petugas

pos indonesia ke alamat yang terdaftar. Dan tidak perlu khawatir akan uang bantuannya pastinya akan dikirim sesuai dengan data dari data unit terpadu. yang sudah terverifikasi dan akurat kebenarannya. Untuk wilayah jaboritabek sendiri meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kawasan tersebut merupakan cakupan dari wilayah administrasi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan yang terakhir Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andika (selaku pendamping KKS).

“untuk kawasan wilayah Gayungan sendiri kita menggunakan bank BNI, dan untuk Malang biasanya bank BRI. Dan untuk wilayah DKI sendiri atau dengan kata lain jaboritabek biasanya di kirimkan melalui kantor pos yang telah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat. Sehingga memudahkan keluarga penerima manfaat dalam menerima bantuan”. ( Hasil wawancara 9 Maret 2021)

Kemudian dana bantuan sosial nontunai ini atau KKS ini yang telah terdaftar dan memiliki Kartu keluarga sejahtera juga bisa datang langsung ke agen elektronik warung Gotong royong atau sering disebut dengan agen e-warong terdekat seperti yang telah di jelaskan dalam wawancara bersama Bapak Andika(selaku pendamping KKS).

“Jadi begini bantuan sosial non tunai atau kartu keluarga sejahtera ini merupakan bantuan yang baik, mengapa begitu, karena bantuan ini sangat memudahkan bahkan sangat mudah. Tanpa adanya perantara untuk penyaluran karena uang bisa di ambil sendiri melalui agen e warong yang sudah bekerja sama dengan himbara atau bisa juga ke atm terdekat. Jika keluarga penerima manfaat mengambil melalui agen elektronik terdekat bisa langsung sekalian berbelanja bahan kebutuhan pokok tanpa harus berpindah pindah tempat, dari tempat satu ke tempat yang lainnya.dan untuk masyarakat yang belum mengerti cara pengambilannya ini

nantinya akan di bantu oleh petugas e warong. Dan petuang e warong sudah sangat mengerti cara mencairkannya”. ( Hasil wawancara 9 Maret 2021)

Sedangkan untuk e warong sendiri merupakan agen dari bank atau beberapa pedagang atau pihak lain yang sudah bekerja sama dengan bank penyalur atau sering disebut himbara. Seperti bank rakyat indonesia (BRI), bank mandiri, bank negara indonesia (BNI), dan bank tabungan negara(BTN). Melalui wawancara dengan bapak Andika juga dijelaskan tentang e warong dan himbara.

“ untuk lebih jelasnya apasih e warong itu dan apa juga hibara tersebut. Jadi e warong merupakan pedagang kebutuhan pokok seperti beras,mie,telor, sabun,kebutuhan dapur, peralatan mandi dan bahkan sayuran. Seperti yang kita banyak temukan di sekeliling kita bahwa agen e warong merupakan kios penjualan bahan bahan kebutuhan sehari hari yang telah bekerja sama dengan bank bank terkemuka atau biasa kita dengar HIMBARA. Sedangkan HIMBARA merupakan himpunan bank bank negara yang menjadi satu artinya sling bekerja sama. Bukans semua bank besar ini membentuk satu bank baru, tetapi membuat semacam komunitas untuk menconnection data untuk batuan sosial non tunai dalam bentuk kartu keluarga sejahtera”. ( Hasil wawancara 9 Maret 2021)

Kemudian apabila dalam pecairan terdapat maslah besar yang tidak bisa di selesaikan oleh petugas e warong atau pegawai bank lain. Dapat melaporkan masalah melalui email *bansoscovid19@kemsos.go.id*. Penjelasan wawancara dengan Bapak andika menjadi pendukung dari pernyataan ini.

“Umpamanya nih kita dalam pencairan kartu keluarga sejahtera melalui agen atau melalui bank. Tetapi pihak bank atau agen tidak bisa menyelesaikan proses pencairan maka keluarga penerima manfaat atau KPM di persilahkan untuk mengirim email. Didalam email tersebut berisi keluhan dari keluarga penerima manfaat yang tidak bisa di selesaikan oleh agen e warong atau pun petugas bank.

Untuk sejauh ini masih belum pernah saya dengar tentang keluhan dari keluarga penerima manfaat tentang kasus kasus fatal mengenai pencairan bantuan sosial non tunai atau dikenal dengan Kartu keluarga sejahtera (KKS). Untuk kawasan Gayungan sendiri jika terjadi masalah saya meminta sebelum mengirim email ke dinas sebaiknya datang ke kantor kecamatan setempat mengapa begitu dan dengar penjelasan dari pihak terkait. Tetapi saya belum menemukan ada keluhan atau permasalahan terkait kartu keluarga sejahtera (KKS)". ( Hasil wawancara 9 Maret 2021)

Begitulah pemerintah memudahkan masyarakat dalam penerimaan bantuan sosial kartu keluarga sejahtera atau bantuan sosial non tunai untuk data terpadu kesejahteraan sosial.sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial non tunai atau dengan kata lain kartu keluarga sejahtera (KKS). Untuk menyiapkan dokumen dahulu agar semua prosesnya bisa berjalan dengan lancar sehingga bantuan sampai ke tangan keluarga penerima manfaat dengan aman.

Kartu keluarga sejahtera ini merupakan sebuah kartu yang penerbitnya adalah pemerintah diperuntukan bagi keluarga kurang mampu atau dengan kata lain miskin. Sebelumnya kartu ini bernama kartu perlindungan sosial atau biasa disebut KPS dan pencairannya berupa tunai. Kini sekarang sudah berubah nama menjadi kartu keluarga sejahtera atau sering disebut KKS yang merupakan bantuan sosial non tunai atau dalam bentuk kartu. Selain itu kartu KKS di terbitkan oleh berbagai bank pemerintah yang tergabung dalam himpunan bank milik negara (HIMBARA). Dan keluarga penerima manfaat menerima kartu KKS ini melalui bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN.

Kartu keluarga sejahtera ini mempunyai banyak manfaatnya diantaranya yaitu kartu KKS dapat menyimpan kuota dana bantuan sosial yang sudah di keluarkan oleh pemerintah. Selain itu kartu ini juga bisa digunakan untuk

mengambil dana bantuan dalam bentuk kebutuhan bahan pokok seperti beras, dan bantuan pangan non tunai lainnya. Selanjutnya kartu ini bisa digunakan untuk uang elektronik atau berfungsi sebagai kartu debit atau sering kita kenal ATM yang dapat di gunakan sebagai transaksi perbankan contohnya menarik saldo, membeli pulsa, membayar tagihan atau sejenisnya. Selain itu kartu KKS ini dapat di gunakan untuk menabung seperti kartu ATM biasanya.

Kartu keluarga sejahtera ini nantinya juga perlu disimpan di tempat yang aman dan tidak boleh sampai hilang. Akan sangat menyulitkan jika ditemukan kartu keluarga tersebut hilang. Dan mengurusnya pun akan menguras waktu yang lama sedangkan bantuan tersebut berjalan terus. Ada berbagai cara untuk mewaspadai supaya kartu tersebut tidak hilang. Pertama jangan memberikan PIN kartu keluarga sejahtera ini kepada siapapun. Karena jika salah seorang ada yang tahu, maka orang tersebut bisa mengambil saldo kartu keluarga sejahtera tanpa sepengetahuan keluarga penerima manfaat. Dan simpanlah kartu keluarga tersebut pada tempat yang aman. Apabila kehilangan kartu tersebut mintalah pihak bank untuk memblokir kartu tersebut. Dengan cara menelepon call center atau datang langsung pada pihak bank. Biasakan mengganti PIN kartu secara terjadwal agar tidak mudah ditebak orang lain. cobalah untuk menghindari membuat pin dengan tanggal kelahiran atau bahkan nomor telepon karena sangat mudah untuk di tebak.

Apabila di kemudian hari terdapat kartu keluarga sejahtera yang hilang atau bahkan rusak. Apabila kartu keluarga tersebut hilang maka yang segera di lakukan adalah blokir kartu dengan cara menghubungi call center kartu tersebut. Dan apabila kartu rusak maka tidak perlu untuk memblokir kartu. Cukup datang



ke kantor bank penerbit kks tersebut. Jangan lupa untuk membawa beberapa berkas bank seperti kartu tanda kependudukan, bukti kepemilikan kartu keluarga sejahtera atau bukti pada saat awal pembukaan kartu keluarga sejahtera atau bisa juga surat kehilangan dari kepolisian. Jika memang kartu tersebut hilang atau pun kartu keluarga sejahtera itu rusak. Selanjutnya bank akan memproses, terkadang akan dikenakan biaya kartu baru. Dan setiap bank mempunyai biaya yang berbeda beda.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Penerapan implementasi kartu keluarga sejahtera dilakukan dengan proses perencanaan dengan penerapan yang sesuai dengan perencanaan yang mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu kecamatan. Sedangkan Gayungan Kota Surabaya merupakan lembaga pemerintah yang menyalurkan bantuan atau tempat yang di tunjuk oleh Dinas Sosial untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaanyang diberikan terhadap masyarakat wajib memenuhi syarat-syarat apa saja yang dapat di peroleh oleh keluarga penerima manfaat atau KPM dalam menerima bantuan sosial.

Faktor yang menjadi penghambat implementasi program kartu keluarga sejahtera yang dapat memberikan masukan. Pelaksanaan kegiatan kartu keluarga sejahtera ini sudah sesuai dengan peraturan Presiden RI No.166 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan . penanggulangan kemiskinan untuk bertujuan mengurangi jumlah kemiskinan penduduk dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Serta pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi kecil serta program yang lainnya dalam meningkatkan kegiatan ekonomi.

Peran Kecamatan Gayungan Kota surabaya antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai pendataan masyarakat keluarga penerima manfaat agar supaya bantuan sosial dengan kondisi yang baik, tepat sasaran sehingga memiliki nilai kesejahteraan yang jauh lebih berarti.

2. Mengayomi semua keluarga penerima manfaat dan staf yang bertugas dalam pelaksanaan semua kegiatan agar tercapainya visi dan misi.
3. Memberikan pelayanan dan berkomitmen untuk memenuhi kepuasan masyarakat melalui pembangunan SDM yang ada di Kecamatan Gayungan dilakukan secara berkesinambungan.

Dari peran kecamatan Gayungan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program implementasi kartu keluarga sejahtera sesuai prosedur yang ditetapkan. Sebelum memasuki e warong maka keluarga penerima manfaat harus membawa kartu e wallet yang telah di berikan dan menghafalkan password ATM nya. Selain itu keluarga penerima mangfaat dilarang untuk menyebar luaskan PIN e walletnya kepada siapapun termasuk petugas.

Setelah menerima uang nya keluarga penerima manfaat bisa membelikan kebutuhan sehari-hari di ewarong tersebut Jika ada keperluan yang akan di beli, atau bisa juga diambil uang saja. Proses tahapan dilakukan agar terciptanya suasana yang kondusif. Kebutuhan pokok yang bisa di beli di ewrong berupa beras, gula, minyak goreng, dan sebagainya.

Faktor yang mempengaruhi implementasi kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya bahwa komunikasi antar organisasi dan aktivitas pihak implementasi, kepada sasaran belum efektif dan mengalami hambatan, karena dalam proses implementasi program kartu keluarga sejahtera pemerintah hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan program bantuan tersebut, sehingga masih ada masyarakat yang belum ikut dalam kepesertaan program KKS ini sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang kurang menyeluruh kepada masyarakat kurang mampu/ miskin tentang adanya pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera (KKS) tersebut, sehingga masih ada masyarakat miskin yang belum terdata untuk diikut serta dalam kepesertaan program kartu keluarga sejahtera (KKS) tersebut.

Dalam upaya melaksanakan kegiatan kartu keluarga sejahtera belum meratanya pembagian kartu keluarga sejahtera untuk warga miskin/kurang mampu, serta ketidaksesuaian data penerima program KKS ini sehingga belum tepat sasaran, hanya sebagian RT saja yang menerima program kartu keluarga sejahtera (KKS) tersebut, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial karena pelaksanaan program kartu keluarga (KKS)

## **5.2 SARAN**

1. Seharusnya pendataan penerima bantuan kartu keluarga sejahtera atau keluarga penerima manfaat (KPM) dilakukan pendataan ulang ,bukan melihat data yang sudah ada sehingga pembagian bantuan sosial lebih merata dan tidak akan terjadi kecemburuan sosial diantara masyarakat.
2. Perlu adanya kerjasama antara pelaksana dan pemerintah pusat untuk meneliti apakah masyarakat tersebut layak menerima bantuan sosial atau tidak mendapatkan bantuan.
3. Kegiatan pelaksanaan implementasi harus tetap transparan untuk meningkatkan kesalahan yang ada dan dapat mengatasi yang muncul dengan tepat.

4. Petugas kartu keluarga sejahtera harus tetap bekerja dengan jujur dan saling mengayomi untuk melaksanakan implementasi kartu keluarga sejahtera agar terjalin hubungan yang sangat harmonis tanpa ada rasa iri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Agustino, 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta : Yogyakarta
- Fahrudi, 2014. *Pengantar kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama : Bandung
- Mardalis, 2017. *Metode Penelitian*, Bumi Aksara : Jakarta
- Pasolong, 2016. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta : Bandung
- Mulyadi, 2015. *Managemen Sumber Daya Manusia*, alfabet : Bandung
- Syaukani dkk, 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka : Yogyakarta
- Winarno, 2014. *Kebijakan Publik dan Proses*, Media Pressindo: Yogyakarta

### Sumber Jurnal

- Anggleni, A, 2018, *Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di kelurahan sekip jaya kecamatan kemuning kota Palembang*.Journal PPS Unisti,1(1), 24-39.
- Framita dara Yolanda pada tahun 2017 yang berjudul *Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang*.
- Suhariato, 2015, *Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Di Kantor Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara*
- Dian Marini (2015), *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Terhadap Masyarakat Miskin Di Desaperawang Barat Kecamatan Tulangan Kabupaten Siak*.
- Winarno, 2014. *Kebijakan Publik Teori Proses, dan Studi Kasus yogyakarta : CAPS (Center Of Academic Publishing service)*

### **Sumber Peraturan Perundang - Undangan**

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden Republik Inonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 63 tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Pangan Non Tunai.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

### **Sumber Internet**

<https://text-id.123dok.com/document/y96oplvy-pelaksanaan-lelang-oleh-kantor-pelayanan-kekayaan-negara-dan-lelang-kpknl-dum>

<https://text-id.123dok.com/document/ye84nj7y-s-sos-1205748-chapter3.html>

<http://motivasionisuyanto.blogspot.com>

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/23306>

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7752?show=full>

### **LAMPIRAN**

1. Pedoman wawancara
2. Surat izin penelitian

3. Kartu bimbingan

4. Dokumentasi



## PEDOMAN WAWANCARA

### **Judul Skripsi: Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gayungan Di Kota Surabaya**

#### **Permasalahan:**

Bagaimana implementasi kebijakan kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya?

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya?

Bagaimana upaya meningkatkan efektifitas implementasi kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya?

#### **Pedoman Wawancara 1** (Bagaimana implementasi kebijakan kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya)

1. Bagaimana peran Kecamatan terkait pelaksanaan Kartu keluarga Sejahtera?
2. Apa itu kartu keluarga sejahtera/KKS?
3. Bagaimana Pihak Kecamatan mensosialisasikan kartu Keluarga Sejahtera kepada masyarakat yang belum mengetahuinya?
4. Apakah syarat dan kriteria untuk mendapatkan program Kartu keluarga Sejahtera?
5. Bagaimana strategi yang dilakukan Kecamatan untuk mengimplementasikan program Kartu Keluarga Sejahtera?
6. Berapa banyak masyarakat di Kecamatan Gayungan yang mendapatkan bantuan KKS?
7. Bagaimana respon masyarakat yang menerima bantuan KKS?
8. Bagaimana cara menerima bantuan KKS ?
9. Berapa persen masyarakat yang mendapatkan bantuan KKS?
10. Bagaimana kesiapan pihak Kecamatan Gayungan dalam mengimplementasikan bantuan KKS?

#### **Pedoman Wawancara 2** (Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya)



1. Apa manfaat yang didapatkan masyarakat yang mendapatkan bantuan KKS?
2. Apa saja yang di dapat kan jika menerima bantuan KKS ini?
3. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan program KKS?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat yang menerima bantuan KKS?
5. Kesulitan apa saja yang dialami pemerintah dan masyarakat terkait bantuan KKS?
6. Apa yang diinginkan masyarakat agar program bantuan KKS dapat berjalan dengan baik dalam membantu mengefisiensikan tugas pihak kecamatan?

**Pedoman Wawancara 3** (Bagaimana upaya meningkatkan efektifitas implementasi kartu keluarga sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya)

1. Bagaimana persiapan dari Kecamatan untuk dapat mengimplementasikan Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya?
2. Adakah pembinaan bagi masyarakat yang mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera?
3. Bagaimana cara Dinas/pemerintah mengkomunikasikan program Kartu keluarga Sejahtera kepada Kecamatan?
4. Bagaimana cara mencairkan dana bantuan KKS?
5. Bagaimana strategi dari Kecamatan untuk mengawasi penggunaan dana Kartu Keluarga Sejahtera?
6. Upaya apa saja yang di lakukan dalam meningkatkan efektifitas implementasi KKS di Kecamatan gayungan kota Surabaya?
7. Kesulitan apa saja yang dialami dalam implementasi KKS?

## SURAT IZIN PENELITIAN

Gambar 1 Surat pengantar Universitas

	<b>YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK STATUS TERAKREDITASI</b>	
Administrasi Publik : 0963/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 Ilmu Komunikasi : 1888/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031-8285602, Ex. 120, 121 Fax. 031 - 8285601		
Nomor	: 3 /II/2021/FSP/UBHARA	24 Februari 2021
Lampiran	: -	
Perihal	: <u>Permohonan ijin Penelitian &amp; Survey</u>	
		Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya di - Surabaya
Dengan Hormat,		
1. Dalam rangka usaha untuk menyusun suatu laporan penelitian/menyusun skripsi bagi mahasiswa/i tingkat akhir, maka dengan ini kami mengharapkan bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan guna melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.		
2. Adapun mahasiswa/i tersebut adalah:		
N a m a	: Khusnul Khotimah	
N I M	: 1713121001	
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	
Program Studi	: Administrasi Publik	
Judul	: Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya	
Tempat Penelitian	: - Kecamatan Gayungan Kota Surabaya	
Lama Penelitian	: 2 minggu	
3. Atas segala bantuan yang diberikan demi keberhasilan penelitian tersebut kami sampaikan terima kasih.		
		 Dra. Tri Prasetyowati, M.Si.
<b>TEMBUSAN : Yth.</b> - Kepala LPPM UBHARA		

## Gambar 2 Surat pengantar Kantor Linmas untuk Kecamatan Gayungan kota Surabaya



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 2 Surabaya 60272  
Telepon (031) 5343000, (031) 5312144 Pesawat 112

Surabaya, 22 Maret 2021

Nomor : 070/4377/436.8.5/2021  
Lampiran : 4377  
Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Camat Gayungan Kota Surabaya

di -  
SURABAYA

### REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor 3/II/2021/FSP/UBHARA Tanggal 24 Februari 2021 Perihal Permohonan Ijin Penelitian/Survey
- Pit. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama : Khusnul Khotimah
  - b. Alamat : Jl. Kertosari Rt:05 Rw:06 Kec. Jabung Kab Malang
  - c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
  - d. Instansi/Organisasi : Universitas Bhayangkara Surabaya
  - e. Kewarganegaraan : WNI
- Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :
- a. Judul/ Tema : Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya
  - b. Tujuan : Penelitian
  - c. Bidang Penelitian : Pelaksanaan Program Pemerintah
  - d. Penanggung Jawab : Drs. Heru Irianto, M.Si
  - e. Anggota Peserta :
  - f. Waktu : 1 (Satu) Bulan, TMT Surat Dikeluarkan.
  - g. Lokasi : Kantor Kecamatan Gayungan Jl masjid Agung No. 2 Gayungan
- Dengan persyaratan
- 1. Dalam masa pandemi Covid-19, pelaksanaan Penelitian wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020.
  - 2. Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan asesment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat.
  - 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomer 2 (dua ) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah.
  - 4. Peserta Penelitian wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan Penelitian.
  - 5. Peserta Penelitian OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder.
  - 6. Pelaksanaan Penelitian tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disitegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI.
  - 7. Pelaksanaan Penelitian harap tidak membebani atau memberatkan warga.
  - 8. Setelah melakukan Penelitian wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang,Politik dan Linmas Kota Surabaya.
  - 9. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



Silahkan scan barcode diatas untuk mengecek validitas surat.

Tembusan :

- Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya
- 2. Saudara yang bersangkutan.

Pit. KEPALA BADAN



Ivan Widyanto, AMP, S.Sos., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690715 199003 1 011

## KARTU BIMBINGAN

TANGGAL	URAIAN	TD.TNGN	TANGGAL	URAIAN	TD.TNGN
1/2020 11	-Labor belakang harus 5 halaman -kata dalam bahasa Inggris di cetak miring -Referensinya google scholar jangan lupa pakai Jurnal	✓	10/2020 12	-Metode penelitiannya harus jelas. -Plagiat harus 30% -di Manfaat peneliti itu manfaat teoritis. -Bukan metodologis	(Signa)
20/2020 11	-Esai penelitian jadikan kunci -Labor belakang kurang menyu satu titik penomoran -jumlah majalah ditambah -lokasi penelitian fokuskan di kecamatan sayung	✓	23/2020 12	-gambaran obyek berisi ruang lingkup substansi -Jelaskan operasionalnya seperti apa.	(Signa)
10/2021 3	-Pedoman wawancara harus sesuai dengan. Keringka dari pak Heru -File dikirim per bab dan pedoman wawancara sendiri	✓	18/2021 6	-Meringim Bab I-V setelah di cek plagiasi sudah di bawah 30%	(Signa)
19/2021 3	Mengirim pedoman wawancara dan diminta untuk lanjut bab IV	✓	21/6 '21	Cek abstr + ACC (Telaah Substansi)	(Signa)
25/2021 3	-Revisi Bab IV dan V untuk lihat di grup dan di sesuaikan contoh	✓			
14/2021 6	-sub bab di bab IV tidak sesuai dengan permasalahan	✓			
17/2021 6	-Bab IV sub babnya tidak urut sesuai permasalahan -Bab V kesimpulan belum menjawab permasalahan	✓			
18/2021 6	-Bab V permasalahan belum sesuai lihat contoh di group	✓			
19/2021 6	ACC skripsi, gabungan bab I-V.	✓			

SURABAYA,  
PEMBIMBING I.

Drs. Heru Irianto, M.Si

SURABAYA,  
PEMBIMBING II

INDRA PRATAMA PUTRA SALMON

SURABAYA,  
PEMBIMBING II.

Indra Putra Salmon, S.AP.M.PA

## DOKUMENTASI

Wawancara bagian penyelenggara kartu keluarga sejahtera

